

**STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI SEKITAR
DESA MARITAING KECAMATAN ALOR TIMUR
KABUPATEN ALOR - NTT**

SKRIPSI

Oleh

YOYAKIM FRANKY SELLY

NIM 45 10 042 042



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

**STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI SEKITAR
DESA MARITAING KECAMATAN ALOR TIMUR
KABUPATEN ALOR - NTT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik (S.T)

BOSOWA

Oleh

**YOYAKIM F. SELLY
NIM 45 10 042 042**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITASBOSOWA "45" MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMPENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI SEKITARDESA MARITAING KECAMATAN ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR - NTT

Disusun dan diajukan oleh

YOYAKIM F. SELLY

45 10 042 042

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal 28 Desember 2017

Menyetujui.

Pembimbing I

Ir. Rudi Latief., M.Si
NIDN 0917076801

Dekan Ketua
Fakultas Teknik

Dr. Ridwan, ST., M.si
NIDN. 09101127101

Pembimbing II

Jufriadi, ST., MSP
NIDN 0931016802

Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota

Jufriadi, ST., MSP
NIDN 0931016802

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa, Nomor : A.200/SK/FT/UNIBOS/XII/2017 pada tanggal 28 Desember 2017 tentang PANITIA dan PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, maka

Pada Hari/Tanggal : Sabtu / 28 Desember 2017

Skripsi Atas Nama : Yoyakim F. Selly

Nomor Pokok : 45 10 042 042

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar setelah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Ketua : Dr. Ir. Syafri, M.Si

Sekretaris : Rusneni, ST., M.Si

Anggota : Ir. Rudi Latief, M.Si

: Jufriadi, ST., MSP

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Teknik

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Ridwan, ST., M.si
NIDN. 09101127101

Jufriadi, ST., MSP
NIDN 0931016802

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoyakim F. Selly

NIM : 45 10 042 042

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan hasil tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Maret 2018

Yang menyatakan,

Yoyakim F. Selly

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yoyakim F. Selly, lahir di Kalabahi Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 12 November 1990. Peneliti memasuki jenjang pendidikan pada tahun 1997 di SD Inpres Bungawaru, dan tamat pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPK ST. Jibrael selesai pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAK ST. Yoseph dan tamat pada tahun 2010. Tahun 2010 melanjutkan pendidikan di Universitas "45" Makassar selesai pada tahun 2018. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas "45" Makassar dengan gelar Sarjana Teknik (S.T)

UNIVERSITAS
BOSOWA



ABSTRAK

Yoyakim F.Selly. 2018“ Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Di Sekitar Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor - NTT.” Dibimbing oleh **Rudi Latief. Jufriadi**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan di sekitar Desa Maritaing kabupaten Alor dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan di sekitar Desa Maritaing kabupaten Alor dan semoga dapat menjadi bahan masukan atau acuan bagi pemerintah sebagai penentu kebijakandalam pembangunan, pihak swasta, lembaga sosial, atau masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian menggunakan metode survey selain itu penelitian ini dilakukan dengan beberapa kajian pustaka sebagai landasan untuk mengidentifikasi indicator dari permasalahan yang ada, serta landasan-landasan untuk rekomendasi yang akan disarankan. Variabel–variabel yang digunakan akan di analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisis chi square dan analisis deskriptif. Dari hasil analisis diperoleh bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di antaranya tingkat usia, lamanya tinggal, intensitas berinteraksi sosial, dan tipe kepemimpinan. Pemerintah sebagai penentu kebijakan harus lebih aktif mengadakan penyuluhan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman karena semua itu untuk kepentingan masyarakat banyak.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Faktor-Faktor Partisipasi, Desa Maritaing Kabupaten Alor

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Berkat-Nya jualah, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan Judul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Disekitar Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor - NTT**”. Tugas ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjanaan STRATA SATU (S-1) pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas “Bosowa” Makassar. Dan merupakan salah satu proses akhir dari kegiatan pembelajaran di Universitas umumnya dan jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Khususnya.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah banyak dibantu oleh orang-orang yang penulis anggap sebagai penolong ataupun motivator berupa dorongan, bimbingan, dan semangat dalam bentuk moril ataupun materil. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Yoel Selly dan Ibu Jublina Nanggi dan seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, doa, asuhan dan bimbingannya, materil maupun dukungan moril dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Ir. Rudi Latief, Msi selaku pembimbing I dan bapak Jufriadi, ST.,MSP selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dengan sabar memberikan masukan-masukan sejak awal bimbingan hingga selesainya penulisan tugas ini.
3. Ibu Dr. Hamsina, ST., M.Si selaku Ketua Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar

4. Bapak Jufriadi ST., MSP selaku Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepada seluruh Staf dan Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas "Bosowa" Makassar.
6. Seluruh rekan mahasiswa Planologi yang telah banyak memberikan semangat dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dan pada akhirnya semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, 16 Maret 2018

Yoyakim F. Selly



DAFTAR ISI

JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENERIMAAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	7
C. Tujuan Dan ManfaatPenelitian.....	7
D. SistematikaPembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. PartisipasiMasyarakat.....	11
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	21
C. Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat	28
D. Pembangunan Desa	30
E. Pemerintahan	36

F. Infrastruktur.....	44
G. Kerangka Pikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi Dan Sampel	52
D. Variabel Penelitian	53
E. Jenis Dan Sumber Data.....	54
F. Teknik Pengumpulan Data	55
G. Metode Analisis Data	56
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	76
C. Aspek Kependudukan	81
D. Sosial Budaya.....	87
E. Kondisi Sarana	88
F. Kondisi Prasarana	90
G. Karakteristik Responden Penelitian.....	92
H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Desa Maritang Kab. Alor.....	93
I. Analisis Kebijakan Pembangunan Di Desa Maritang.....	98
J. Analisis Hubungan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi	

Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Desa

Maritaing..... 99

K. Beberapa Upaya Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan

Kualitas Lingkungan Desa Maritaing Kabupaten Alor..... 109

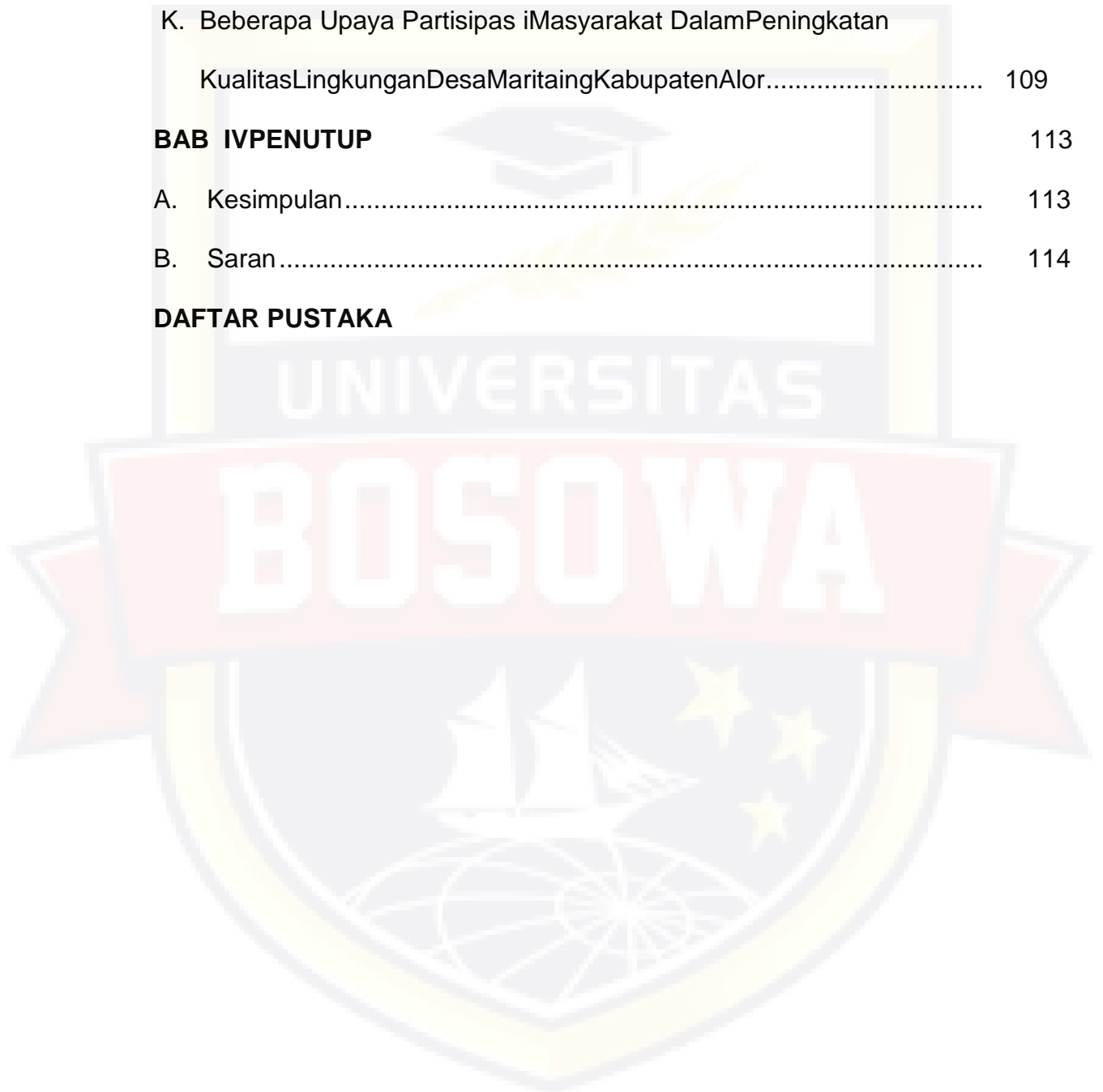
BAB IV PENUTUP

113

A. Kesimpulan..... 113

B. Saran..... 114

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Skala Nilai Hasil Uji Kontengensi	59
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan diKecamatan Alor Timur	61
Tabel 4.2	Luas Wilayah Menurut Kelerengan diKecamatan Alor Timur.....	63
Tabel 4.3	Luas Wilayah Menurut Jenis batuan di Kecamatan Alor Timur.....	64
Tabel 4.4	Luas Wilayah Desa/Kelurahan Menurut Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Alor Timur.....	67
Tabel 4.5	Jumlah Sekolah Menurut Status Dan Tingkat Pendidikan Dirinci Tiap Desa/Kelurahan T/A 2016/2017.....	69
Tabel 4.6	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya Dirinci Tiap Desa/Kelurahan Tahun 2015.....	71
Tabel 4.7	Jumlah Tempat Ibadah Menurut Agama Dirinci Tiap Desa/Keluahan Tahun 2015.....	72
Tabel 4.8	Jenis Dan Kondisi Jalan Di Kecamatan Alor Timur Tahun 2012.....	73
Tabel 4.9	Luas Wilayah Menurut Kelerengan Di Desa Maritaing.....	78
Tabel 4.10	Luas Wilayah Menurut Jenis Batuan Di Desa Maritaing ...	79
Tabel 4.11	Jumlah Dan Perkembangan Penduduk Di Desa Maritaing Tahun 2013-2017.....	82
Tabel 4.12	jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Maritaing Tahun 2017.....	82
Tabel 4.13	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Di Desa Maritaing Tahun 2016.....	83
Tabel 4.14	Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Desa Maritaing Tahun 2016.....	84

Tabel 4.15	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharaan Di Desa Maritaing Tahun 2016	85
Tabel 4.16	Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Desa Maritaing Tahun 2017	89
Tabel 4.17	Tingkat Usia Menurut Responden Di Desa Maritaing Tahun 2018.....	94
Tabel 4.18	Lamanya Tinggal Menurut Responden Di Desa Maritaing Tahun 2018.....	95
Tabel 4.19	Intensitas Masyarakat Berinteraksi Sosial Menurut Responden Di Desa Maritaing Tahun 2018	96
Tabel 4.20	Tipe Kepemimpinan Yang Disenangi Masyarakat Menurut Responden Di Desa Maritaing Tahun 2018	97
Tabel 4.21	Hubungan Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Usia Di Desa Maritaing Tahun 2018	100
Tabel 4.22	Hubungan Tingkat lamanya tinggal dengan tingkat partisipasi Masyarakat Di Desa Maritaing	102
Tabel 4.23	Hubungan Tingkat Interaksi Sosial Dengan Partisipasi Masyarakat Di Desa Maritaing Tahun 2018.....	104
Tabel 4.24	Tipe Kepemimpinan Dengan Partisipasi Masyarakat Di Desa Maritaing Tahun 2018	106
Tabel 4.25	Prioritas Pelaksanaan Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Maritaing Tahun 2018.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pola Pikir Alur Penelitian.....	49
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kec. Alor Timur.....	62
Gambar 4.2 Peta Kepadatan Penduduk	68
Gambar 4.3 Peta Administasi Desa Maritaing	77
Gambar 4.4 Peta Kepadatan Penduduk Desa Maritaing	85
Gambar 4.5 Salah Satu Fasilitas Pendidikan Di Desa Maritaing	88
Gambar 4.6 Salah Satu Fasilitas Kesehatan Di Desa Maritaing.....	88
Gambar 4.7 Salah Satu Fasilitas Peribadatan Di Desa Maritaing.....	89
Gambar 4.8 Kondisi Jalan Di Desa Maritaing	81

BOSOWA



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa akan selalu mengalami perkembangan selama fungsi dan kekuatan yang merupakan penyebabnya terus bekerja dan meningkat, yaitu penduduk dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri. Fungsi tersebut mempunyai dampak yang luas dan mencakup berbagai dimensi kehidupan Pedesaan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan fungsional Pedesaan menyebabkan peningkatan kebutuhan akan pelayanan di Pedesaan.

Keberadaan lokasi suatu Desa diharapkan dapat berperan secara aktif dan fungsional dalam menunjang proses pembangunan Perkotaan. Peranan Desa semakin besar, karena Desa disamping merupakan sumber panghasil sumber alam dan Penduduk yang makin lama makin meluas. Desa juga merupakan konsentrasi kegiatan administrasi pemerintahan yang kecil dari suatu daerah, dan merupakan sumber perdagangan, pendidikan, kebudayaan, serta sosial ekonomi.

Pertumbuhan penduduk desa yang sangat pesat mempunyai implikasi yaitu meningkatnya tuntutan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana yang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perlu disadari bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh

Pedesaan, dimana ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana dan prasarana masih terbatas dan belum secara merata dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat pada suatu desa, ini ditandai dengan meningkatnya konsentrasi lingkungan permukiman yang sering tidak diikuti dengan meningkatnya sarana dan prasarana penunjang permukiman. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan akan sarana dan prasarana khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun dan pada gilirannya memberikan kontribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh.

Perkembangan lingkungan permukiman tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk baik karena faktor pertumbuhan penduduk itu sendiri. Seiring pertumbuhan penduduk di suatu daerah, maka kebutuhan penyediaan akan sarana dan prasarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan atau pembangunan baru. Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah

sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.

Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan.

Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator

untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Pembangunan di wilayah pedesaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang semakin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakkan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, perkembangan perkotaan dan ketahanan nasional. Untuk itu, pembangunan pedesaan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara memperdayakan setiap komponen di masyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan masing-masing desa.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa.

Menurut Putnam (1993), mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan, termasuk dalam membangun infrastruktur perdesaan, adalah berkaitan dengan situasi saling ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama.

Salah satu bentuk program pemerintah dalam mempercepat pembangunan khususnya di perdesaan adalah program Alokasi Dana Desa. Di Kabupaten Alor Propinsi NTT program ini telah dilaksanakan dan pelaksanaannya mencakup pada berbagai desa. Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai oleh Program Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan selama ini adalah infrastruktur yang berskala kecil yang tidak dibiayai oleh APBD melalui instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan lainnya namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Pada umumnya infrastruktur yang dibangun berupa perintisan jalan, drainase, talud dan bangunan posyandu serta pemeliharaan bangunan dan gedung. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tersebut diatas peran serta masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya sudah sangat besar, hal ini ditandai dengan adanya sumbangan berupa tenaga, dana, material dan lahan yang diberikan

oleh masyarakat secara cuma-cuma demi terselenggaranya pembangunan tersebut.

Partisipasi masyarakat Desa Maritaing relatif bervariasi baik dari segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya. Dari segi intensitasnya ada yang partisipasinya sangat rendah, dan ada pula yang sangat tinggi. Dan dari segi bentuknya ada yang partisipasinya dalam bentuk pemikiran/ide, dan ada pula yang partisipasinya dalam bentuk materi dan uang tunai. Intensitas dan bentuk partisipasi masyarakat di atas dapat pula berbeda diantara bidang-bidang partisipasi dalam pembangunan, seperti dibidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi/monitoring, dan pemanfaatan hasil/pengawasan. Secara teori perbedaan tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dimaksud adalah kesadaran/kemauan, pendidikan, dan penghasilan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari kepemimpinan dan fasilitas yang tersedia.

Namun, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta kurangnya perhatian pemerintah untuk berpartisipasi dapat menjadi masalah dalam menjalankan program peningkatan kualitas lingkungan permukiman di sekitar Desa Maritaing Kabupaten Alor.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Kualitas Lingkungan Di Sekitar Desa

Maritaing. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Kualitas Lngkungan Di Sekitar Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor – NTT”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Kualitas Lingkungan Desa?
2. Bagaimana upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kualitas Kualitas Lingkungan Di Sekitar Desa Maritaing?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Kualitas Lingkungan Di Sekitar Desa Maritaing

- b. Mengidentifikasi berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Kualitas Lingkungan Di Sekitar Desa Maritaing

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur desa
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dalam pembangunan infrastruktur desa
- c. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun dengan mengikuti alur pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan

penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka, yang mencakup tinjauan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pembangunan desa, infrastruktur, pemerintah dan pejabat yang terlibat dalam pembangunan desa.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, mencakup lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode Studi, kerangka pembahasan dan defenisi operasional.

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi partisipasi masyarakat dalam Kualitas Lingkungan Di Sekitar Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Adalah :Membahas tentang karakteristik responden penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan pedesaan di Desa maritaing, Studi

kebijakan pembangunan di Desa Maritaing, Studi hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pembangunan pedesaan di Desa Maritaing, prioritas peningkatan partisipasi masyarakat, dan beberapa upaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan pedesaan di Desa Maritaing Kabupaten Alor

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil Studi yang telah digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Participation*", *take a part*, artinya peran serta atau ambil bagian atau kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut. Partisipasi dalam pembangunan dipandang sebagai sebuah metodologi yang mengantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan mencari solusi dari

masalah yang dihadapi tersebut, sehingga memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Menurut Verhangen, sebagai suatu kegiatan partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

- a. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki.
- b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
- c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Adanya kepercayaan dir, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan

Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan (Keith Davis, 1962) dalam Sastropetro (1998: 12). Ada tiga unsur penting yang dimaksud

dalam definisi Keith Davis tentang partisipasi, yang memerlukan perhatian khusus yaitu (1) bahwa partisipasi atau keikutsertaan (keterlibatan/peran serta) sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih daripada kata-kata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah; (2) ketersediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota dalam kelompok dengan segala nilainya; (3) unsur tanggung jawab, unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota berarti ada: “(*sense of belongingines*)” (Sastropetro, 1998:14).

Menurut pemahaman umum, partisipasi mensyaratkan adalah akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Jadi partisipasi masyarakat mencakup semua aspek interaksi antara masyarakat dan pemerintah.

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi “lebal baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktikkan

sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikutserta keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Bedasarkan uraian pendapat diatas, maka yang dimaksud dengan partisipasi dalam penelitian ini adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam Peningkatan kualitas lingkungan desa.

2. Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi yang ditunjukkan masyarakat, juga berkaitan dengan kemauan politik (political will) penguasa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Tentang hal ini, Raharjo mengemukakan adanya tiga variasi bentuk partisipasi, yaitu

- a. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan, di atasi.
- b. Partisipasi penuh, artinya partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan. Mobilisasi tanpa

partisipasi, artinya partisipasi yang yang dibangkitkan pemerintah (penguasa), tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijaksanaan pemerintah.

Sejalan dengan pemikiran diatas Hogley mengidentifikasi adanya tujuh tipe partisipasi yaitu :

- a. Partisipasi pasif, Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran.
- b. Partisipasi informative, Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan mempengaruhi
- c. Partisipasi konsultatif, Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi
- d. Partisipasi konsultatif, Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama
- e. Partisipasi fungsional, Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek
- f. Partisipasi interaktif, Masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan

g. *Zelf mobilization* (Mandiri), Masyarakat memegang kendali pemanfaatan sumber daya yang ada

Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat

memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi. Bentuk partisipasi yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi diantaranya bentuk-bentuk partisipasi: partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan atau minuman seadanya tanpa ada timbal balik (jasa).

Dusseldrop, mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d. Menggerakkan sumber daya masyarakat.
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya

3. Tingkat Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox mengemukakan adanya lima tingkatan, yaitu:

- a. Memberikan informasi
- b. Konsultasi yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- c. Pengambilan keputusan bersama, dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.

d. Bertindak bersama, dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.

e. Memberikan dukungan, dimana kelompok-kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutuhidupnya.

Partisipasi masyarakat menjadi mengemuka dan penting dalam pelaksanaan pembangunan termasuk didalamnya penataan ruang diantaranya karena beberapa hal positif yang dikandungnya :

- a. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dicapai.
- b. Dengan partisipasi pelayanan atau *service* dapat diberikan dengan biaya yang rendah.

- c. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya.
- d. Merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
- e. Mendorong timbulnya rasa tanggung jawab.

Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat menurut UU No 25 tahun 2004 ialah masyarakat bersama pemerintah merupakan stakeholder dalam proses pembangunan. Artinya masyarakat merupakan elemen penting yang sangat menunjang keberhasilan dari pembangunan tadi, masyarakat diberikan peran yang cukup sentral.

Di dalam pembangunan agar kiranya masyarakat tadi dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan ataupun proses pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah. Secara konseptual, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Slamet menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
- b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan Membangun dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang dikehendaki. Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu dan atau golongan.

Menurut Ndraha, upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain :

- a. Memberi stimulasi kepada masyarakat dengan mengharapkan timbulnya respon yang dikehendaki.
- b. Menyesuaikan program Pemerintah dengan kebutuhan (keinginan) yang telah lama dirasakan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.

c. Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan atau perlunya perubahan di dalam masyarakat dan dalam diri anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga timbul kesediaan berpartisipasi

Dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat, komunikasi mempunyai peranan penting dalam memelihara hubungan secara timbal balik, di satu pihak pemerintah menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, sedangkan di lain pihak masyarakat menyampaikan gagasan, keinginan atau kebutuhannya kepada pemerintah.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell (dalam Ross,1967:130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu :

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Dari kelompok usia menengah keatas dengan keterkaitan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mampu perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Mengacu pada teori Moslow, teori Rogers dan teori Siagian dalam Salam (2002:21) bahwa orang akan berpartisipasi disebabkan oleh faktor yaitu: faktor motivasi (Moslow 1978), faktor pengetahuan (Rogers 1974:37) dan faktor kepemimpinan (Siagian 1992:84)

1. Faktor Motivasi

Dalam konteks untuk meningkatkan kualitas permukiman bahwa orang akan termotivasi untuk berpartisipasi apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi dalam permukiman seperti:

a. Rasa aman

Permukiman bukan hanya sebagai wadah secara fisik saja tetapi harus berfungsi sebagai kediaman atau tempat berlangsungnya kehidupan manusia setelah secara fisik permukiman mampu memenuhi fungsi sebagai tempat teduh dari gangguan alam dan cuaca maka giliran berikutnya harus memenuhi fungsi sebagai kediaman atau permukiman untuk memperoleh kesenangan ketentraman hidup serta mampu mengespresikan kepribadian penghuninya.

b. Interaksi sosial

Berinteraksi sosial merupakan perwujudan dari kebutuhan sosial yang termotif kuat setelah kebutuhan perlindungan dan kearahannya sesuai teori Maslow permukiman harus mewujudkan kebutuhan warganya untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan sosial yakni disenangi, dianggap sebagai pribadi yang setia kawan, dan dapat bekerja sama dalam kelompok masyarakat.

c. Prasarana dan sarana permukiman

Permukiman sebagai wadah yang dapat mewujudkan kebutuhan mempertahankan hidup permukiman seharusnya memiliki prasarana dan sarana yang mampu memberikan perlindungan sebagai masyarakatnya sehingga kebutuhan

primernya dapat terpenuhi selain itu prasarana dan sarana permukiman juga dapat mewujudkan rasa aman.

2. Faktor Pengetahuan

Setelah kebutuhan dasar seseorang terpenuhi, orang akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya yaitu seperti kebutuhan pengetahuan.

Pengetahuan adalah hasil dan tahu ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu pengetahuan atau kognitif merupakan “domain yang sangat penting untuk membentuknya tindakan seseorang (Rogers:1974:37) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, didalam diri seseorang tersebut terjadi proses yang berurutan yakni : a) *awarenes* (kesadaran) dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu stimulus (objek); b) *interest*, dimana orang melalui tertarik pada stimulus; c) *evaluation*, menimbang-nimbang baik tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya; d) *trial*, dimana orang telah mencoba perilaku baru; dan e) *adoption*, dimana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.

Berdasarkan penelitian rogers tersebut diatas maka dapatlah bahwa proses masyarakat untuk tiba pada tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan peningkatan kualitas permukiman secara beruntun

adalah a) tidak tahu, b) kurang mengetahui, c) mengetahui dan memahami.

Pola dan tingkat partisipasi masyarakat pembangunan sangat ditentukan oleh pengetahuan terhadap pembangunan tersebut oleh karena itu pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dianggap berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

3. Faktor Kepemimpinan

Menurut Siagian (1992:84) faktor yang turut mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah kepemimpinan tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan.

Faktor ini merupakan salah satu penentu keberhasilan tumbuhnya partisipasi masyarakat karena kepemimpinan inilah yang menstimulasi dan menggerakkan masyarakat secara tepat dengan jalan menerapkan kemampuannya berkomunikasi secara baik dan efektif selain itu kepemimpinan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah dianggap efektif apabila dapat menunjukkan kesepakatan bersama dalam menanggapi kebutuhan aktual masyarakat.

Kepemimpinan sebagai suatu kemampuan "seseorang mempengaruhi perilaku orang lain untuk berfikir dan berperilaku dalam rangka kemanusiaan dan pencapaian tujuan organisasi atau kelompok didalam situasi tertentu macam-macam kepemimpinan diantaranya

- a. Otokratik/otoriter memaksakan mengatur mendikte anggota anggota sebagai benda harus diladeni sebagai diktator /penguasa mutlak.
- b. Demokratik anggota dianggap manusia dan dihormati saran saran anggota diperhatikan sifat koligial.
- c. Petemalistik/kebakapan sifat sebagai bapak mengatur mengambil prakarsa merencanakan dan melaksanakan sesuai polanya tidak diktator dan membantu anggota dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijaksanaan.

Ada ahli yang merinci gaya kepemimpinan lebih lanjut umum perlu dikemukakan bahwa dalam prakteknya tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik paling penting adalah dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi/waktu kemampuan yang dipimpin teman-teman sekerja harapan dan tujuan kelompok (dengan melibatkan tingkat kedewasaannya) jadi gaya kepemimpinan cenderung berbeda-beda dan secara umum gaya kepemimpinan terdiri atas :

- a. Tipe ditektif komunikasi satu arah peranan anggota dibatasi menunjukan apa kapan dimana dan bagaimana menjalankan tugas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh pimpinan pelaksana pekerja diawasi dengan ketat.

- b. Tipe konsultatif komunikasi dua arah memberi support pada anggota dengan keluhan perasaan anggota dalam menentukan keputusan tetap oleh pimpinan
- c. Tipe partisipatif pemecahan masalah dan pengambilan keputusan seimbang; komunikasi dua arah meningkat anggota banyak didengar masalah di diskusikan dan anggota diberi hak melaksanakan keputusan seluruhnya kepada anggota.

C. Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)* dalam Monique Sumampouw, 2004 adalah:

1. Cakupan, Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

2. Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*), pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
3. Transparansi, semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*), berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*), berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. Pemberdayaan (*Empowerment*), keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

D. Pembangunan Desa

Menurut buku panduan persatuan bangsa-bangsa dalam Hartoyo dkk. (1996:6) pembangunan adalah suatu proses dimana anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan merencanakan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

Lebih lanjut dikatakan pembangunan dimaksudkan untuk meletakkan landasan yang kuat dan kokoh bagi masyarakat di daerah berkembang atas kekuatan dan kemampuan sendiri, sedangkan pemerintah hanyalah bersifat memberi bantuan, pengarahan dan bimbingan serta mengarahkan yang dapat meningkatkan usaha tumbuh dan berkembang dari desa swadaya, swakarya desa swasembada.

Beratha (1992:7) pembangunan adalah suatu pembangunan dari masyarakat unit pemerintah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistematis dan terarah sebagian penting dalam pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh.

Apabila kedua definisi tersebut diatas kita analisis sesuai dengan semangat pembangunan dikawasan pedesaan, yang mengutamakan semangat tumbuh dari dalam untuk dan berkembang yang secara mandiri, tidak menunggu uluran tangan dari luar. Dengan demikian, dalam gerak derapnya pembangunan masyarakat desa, desa tidak

lagi menjadi objek dalam pembangunan, melainkan menjadi subjek dalam pembangunan. Sementara itu, garis-garis besar perencanaan pembangunan lima tahun menyebutkan pembangunan masyarakat adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan jalan melakukan pembangunan yang integral dari masyarakat, berdasarkan azas kekuatan sendiri dari masyarakat dengan pembimbing serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan (kebutuhan) dalam rangka kebijaksanaan bersama.

Azas pembangunan integral dimaksudkan ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat (pertanian, pendidikan, kesehatan perumahan dan sebagainya) sehingga menjamin suatu pembangunan yang selaras dan tidak berat sebelah. Azas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertamanya harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah. Sedangkan azas pemufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan yang besar-besar dirasakan sebagai kekuatan oleh anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedangkan putusan itu melaksanakan proyek itu bukannya berdasarkan perintah atasan, melainkan keputusan bersama anggota masyarakat desa.

Ndraha (1990:3) memberikan kesimpulan-kesimpulan tentang pembangunan sebagai berikut “pembangunan sebagai suatu proses didalam mana masyarakat berkenan mengambil bagian secara aktif atas dengan pendekatan ini berpartisipasi dan memberikan bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengawasan dan bantuan.

Pendapat tersebut diatas apabila kita analisa berdasarkan salah satu pendekatan perencanaan pembangunan yang harus dilakukan adalah perencanaan pembangunan yang dilakukan dari bawah (*bottom up*) implikasinya, aspirasi dan partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting proses perencanaan, implementasi dan evaluasi serta kontrol terhadap dan kebijakan pemerintah daerah termasuk hal penggalan dana dan alokasinya.

Berdasarkan batasan atau konsep pembangunan desa yang dikemukakan para ahli tersebut diatas, maka pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berencana untuk seluruh lapisan masyarakat dan bukan untuk golongan tertentu atau sebagian masyarakat.

Oleh karena itu, konsekuensinya dalam realisasi pembangunan desa baik pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang bersifat fisik manfaatnya konsisten berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia masyarakat. Pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip

pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pembangunannya. Berikut menjelaskan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita (2006:18-20):

1. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas) dan berkelanjutan (*sustainable*)
2. Sasaran pembangunan pedesaan yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas, percepatan pertumbuhan desa, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta perkuatan kelembagaan.
3. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan, pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*interrural-urban relationship*).

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab penuh dalam rangka pembangunan desa. Pemerintah kabupaten wajib melakukan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa dan memberikan fasilitas kepada masyarakat. Menurut Ndraha (1990:71) membangun desa adalah setiap pembangunan yang ada didalam prosesnya masyarakat desa berpartisipasi aktif. Sedangkan menurut Batten, pembangunan desa adalah suatu proses dimana organisasi atau masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian mereka merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan hidup (Ndraha, 1990:72).

Tetapi dalam menentukan pembangunan desa ini, banyak sekali hambatan yang dapat ditemui. Hambatan-hambatan itu menurut *Butterfield* dalam Ndraha, 1990:70) adalah :

1. Perbedaan persepsi. Perencanaan pembangunan sering tidak tepat dalam menanggapi antara apa yang pemerintah dengan apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dipedesaan. Sehingga terjadi permasalahan dalam pembangunan desa, karena masyarakat desa memiliki persepsi yang buruk terhadap pembangunan yang dilakukan didesanya.
2. Kesukaran memilih model pembangunan yang tepat. Kesulitan ini muncul karena masyarakat pedesaan itu pada umumnya tertutup dan masih bingung dalam menerima hal-hal baru

sehingga pemerintah pun menjadi bingung dalam menentukan model pembangunan apa yang sebaiknya diterapkan bagi masyarakat pedesaan.

3. Batasan waktu, dimana pembangunan pedesaan lambat sekali kelihatan hasilnya sehingga pemerintah sering merasa kurang sabar dalam menangani usaha pembangunan desa.
4. Persoalan praktis. Hambatan ini muncul bila hal-hal dalam tarap pelaksanaannya membuat pembangunan desa terlambat, misalnya saja kurangnya teknologi, kurangnya pengelola yang terlatih dan sebagainya.

Memperhatikan kekurangan dan kegagalan perencanaan pembangunan di desa pada masa lalu, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pendekatan pembangunan di desa atau pedesaan yang sesuai dengan kompleksitas pembangunan serta aspirasi masyarakat.

E. Pemerintah

Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan,

berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu dari segi structural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara.

Menurut Kamus umum besar Indonesia Pengertian pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
2. Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).

Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri. (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Adapun Asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum Keterbukaan
- d. Proporsional
- e. Profesionalitas
- f. Akuntabilitas
- g. Efektifitas dan efisiensi
- h. Kearifan local
- i. Keberagaman dan
- j. Partisipatif

Secara substantif, partisipasi masyarakat mencakup tiga hal. Pertama, voice (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan. Pemerintah, sebaliknya mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis perencanaan

pembangunan. Kedua, akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi perencanaan pembangunan desa dan akses terhadap sumberdaya lokal. Ketiga, kontrol, yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap lingkungan kehidupan dan pelaksanaan pembangunan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang pemerintah daerah, masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap implementasi otonomi daerah. Tidak terkecuali masyarakat ditingkat desa yang memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, masyarakat desa sangat sadar keberadaan institusi-institusi demokrasi desa selama ini berada dalam kondisi yang tidak kondusif dalam mendorong menegakkan demokrasi pada level akar rumput (masyarakat pedesaan).

Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi sering kali ditentukan secara masif yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat

CommunityDevelopment sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena akan menentukan di mana peran pemerintah dan di mana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergi.

Secara umum, ada tiga kendala yang dihadapi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kebijakan pembangunan yaitu;

- a. Instrumen hukum tidak mengatur secara eksplisit bagaimana, dimana dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan publik.

b. Banyak LSM-LSM dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di berbagai bidang memiliki keterbatasan dalam membawa aspirasi rakyat.

c. Banyaknya organisasi kemasyarakatan dan LSM di era reformasi menyulitkan untuk menentukan organisasi kemasyarakatan mana yang dapat dianggap mewakili aspirasi masyarakat.

Adapun jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala partisipasi agar pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dapat berjalan baik adalah:

- a. Diperlukan instrument hukum yang secara substantif mengatur pelibatan masyarakat, sehingga mekanisme pelibatan masyarakat menjadi jelas
- b. Perlu keterbukaan dan akuntabilitas dari pihak pemerintah yang peka terhadap kepentingan public
- c. Masyarakat perlu bersatu dalam suatu wadah yang terorganisir dan independent yang dapat digunakan sebagai saluran partisipasi.

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah

menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk baik bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Terkait dengan tugas pokok Pemerintahan maka ada tugas yang dapat diserahkan atau dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, namun ada pula beberapa tugas Pemerintah yang tidak dapat dikerjakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selebihnya merupakan tugas Pemerintah yang dapat diserahkan wewenangnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Daerahnya. Adapun tugas pokok Pemerintahan menurut Rasyid yaitu mencakup pertama, Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin

agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidangbidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non Pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh Pemerintah. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif, dan semacamnya. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi Negara dan masyarakat. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Selain itu, Rasyid menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam

masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh Pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

F. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas kehidupan manusia. Infrastruktur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Dalam kehidupan manusia akan melakukan berbagai aktivitas yang dapat mendukung mereka untuk tetap dapat bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Untuk dapat melakukan aktivitasnya tersebut, masyarakat membutuhkan suatu pelayanan-pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung mereka dalam beraktivitas. Berbagai pelayanan yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam beraktivitas ini disebut juga dengan infrastruktur. Peran infrastruktur sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem

sosial dan system ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan. Dari definisi tersebut Grigg membagi infrastruktur dalam 13 kategori yang meliputi :

- a. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan distribusi, fasilitas pengelolaan air (*treatment plant*).
- b. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengelolaan, pembuangan dan daur ulang.
- c. Fasilitas pengelolaan limbah (padat).
- d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi.
- e. Fasilitas lintas air dan navigasi.
- f. Fasilitas transportasi : jalan rel, bandar udara, termasuk didalamnya adalah tanda dan fasilitas pengontrol.
- g. Sistem transit publik.
- h. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi
- i. Fasilitas gas alam Gedung publik : Kantor, sekolah, rumah sakit
- j. Fasilitas perumahan public
- k. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain
- l. termasuk stadion
- m. Komunikasi.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah. Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan yang tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Keterkaitan fungsi diantara infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya.

Dalam hal perbaikan pembangunan infrastruktur, pemerintah Desa Maritaing melakukan pembangunan pada infrastruktur jalan. Pembuatan jalan baru adalah salah satu upaya pemerintah setempat dalam memudahkan masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pekerjaannya.

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 1980, Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Klasifikasi jalan dibagi menurut fungsi, kelas jalan, medan jalan dan wewenang pembinaaan jalan.

Adapun klasifikasi menurut fungsi jalan terdiri atas 3 golongan yaitu:

- a. Jalan arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
- b. Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal yaitu Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

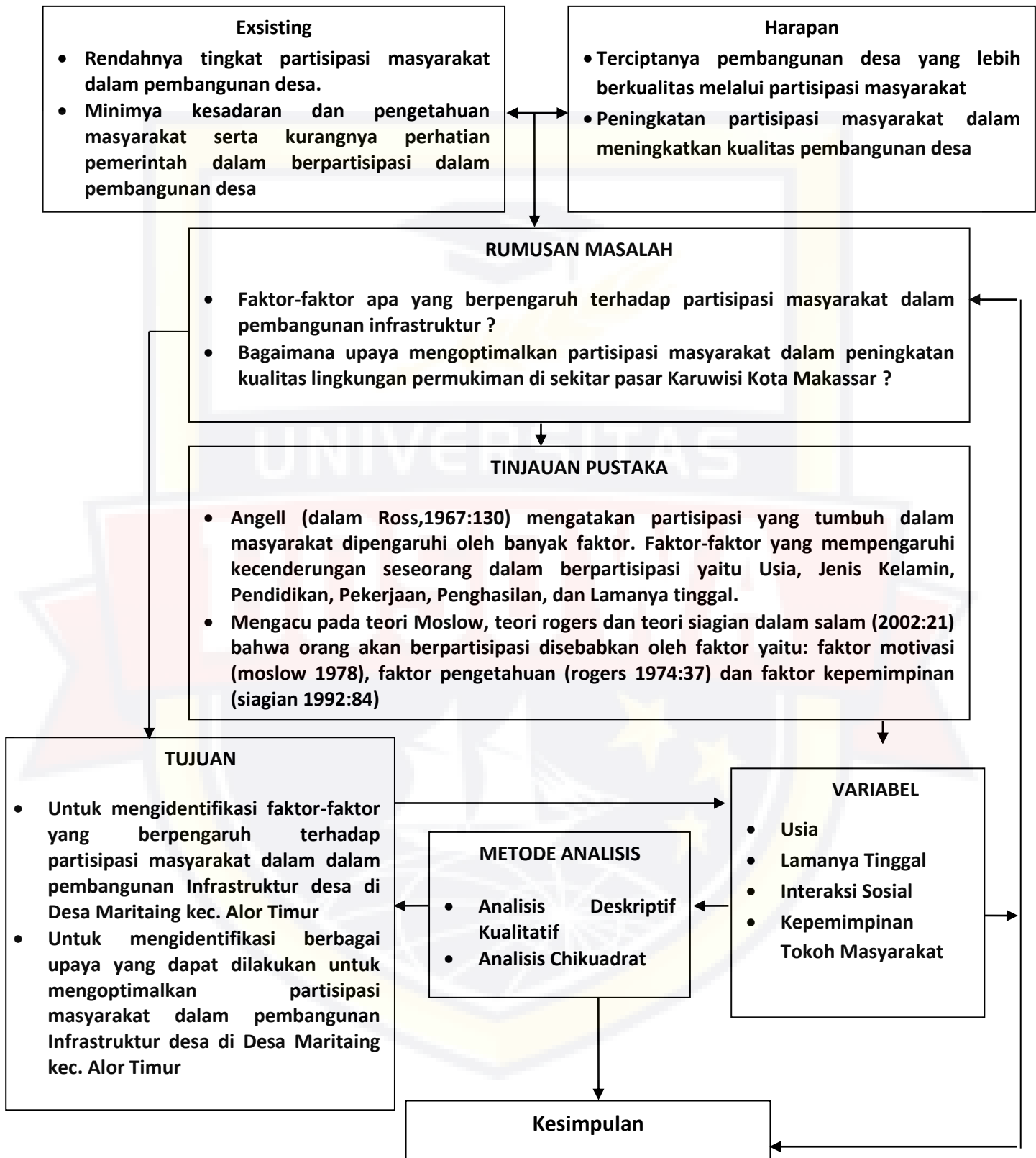
G. Kerangka Pikir

Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut dapat berlangsung optimal apabila didukung oleh berbagai hal seperti keaktifan waktu, tenaga dan dana serta kemampuan wawasan dari masyarakat dalam rangka penyumbangan ide bagi kepentingan

pembangunan. Sebaliknya apabila masyarakat tidak memiliki kesempatan secara personal karena sibuk oleh kegiatan individu, tenaga dan dana karena kemampuan finansial yang tidak memadai/ kategori pendidikan miskin serta pendidikan dan pengetahuan yang rendah maka optimalisasi bentuk

Untuk lebih jelasnya keterkaitan variable dan sub-variabel dalam penelitian ini sebagaimana yang digambarkan pada bagan sebagai berikut:





Gambar 2.1. Pola Pikir Alur Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat di dalam suatu kegiatan penelitian. Secara lebih terinci menurut Nazir (1988 : 51), metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat-alat ukur apa yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian.

Jenis tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta

memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. Tipe penelitian ini menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting social atau hubungan yang digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari survey literatur, laporan hasil penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi. Melalui pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat dideskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa dari gejala itu. Jadi penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan di fokuskan pada Desa Maritaing yang merupakan salah satu Desa yang dalam proses pembangunan infrastruktur dan merupakan desa yang berada pada perbatasan antara Negara Indonesia dan Negara Timor Leste.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa partisipasi masyarakat dalam kualitas lingkungan Desa Maritaing memiliki potensi dan layak untuk dikaji. Akan tetapi dalam

kenyataannya saat ini belum dapat berjalan seperti apa yang diharapkan.

C. Populasi Dan Sampel

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian maka diperlukan populasi dan sampel sebagai berikut :

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan di duga (Singarimbun, 1995: 152). Dalam hal ini populasi berkenaan dengan data bukan pada orangnya atau bendanya (Nasir, 1999: 327). Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Desa Maritaing yaitu 171 jiwa.

2. Sampel

Sampel yaitu kumpulan sebagian dari populasi yang akan diteliti dengan ciri-ciri dan keberadaannya dianggap berkualitas atau mampu menggambarkan karakteristik atau profil keberadaan populasi sebenarnya.

Adapun pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin, 1960 dalam Alimuddin Tuwu (2006:161) yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dimana;

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

E = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan
(persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi)

Sampel dari masyarakat yang berada di Desa Maritaing sebanyak 171 jiwa dengan batas kesalahan yang diinginkan adalah 5 %, dengan acuan bahwa untuk populasi yang sangat kecil diperlukan minimum 5 % Gay, 1976 dalam Alimuddin Tuwu (2006:163)

$$n = \frac{171}{1 + 171 (0,05)^2}$$
$$n = \frac{171}{1 + 171 (0,0025)}$$
$$n = \frac{171}{1,4275}$$
$$n = 120 \text{ Orang}$$

D. Variabel Penelitian

Variabel/indikator yang digunakan dalam penelitian ini, adalah persepsi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di sekitar Desa Maritaing, yaitu :

1. Variabel Terikat (Dependent) Variabel (Y) =
Tingkat Partisipasi Masyarakat
2. Variabel Bebas (Independent) Variabel (X) terdiri dari :
 - a) Usia (X1)

- b) Lamanya Tinggal (X2)
- c) Interaksi Sosial (X3)
- d) Kepemimpinan Tokoh Masyarakat (X4)

Sehingga dapat digambarkan dengan fungsi matematis sebagai berikut :

$$Y = f(x_1, X_2, X_3, X_4)$$

E. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Berdasarkan variabel/indikator yang diuraikan diatas, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi;

- a. Tingkat partisipasi masyarakat
- b. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa
- c. Pembangunan Infrastruktur Desa
- d. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber, karena jenis data yang dibutuhkan juga ada dua. Adapun sumber data, sebagai berikut;

- a. Data primer, diperoleh langsung dari responden dan informan penelitian dengan cara melaksanakan observasi terhadap

berbagai macam pelaksanaan pembangunan, dan wawancara. Data primer antara lain: tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan berupa pelaksanaan gotong royong, sumbangan dalam bentuk materi dan tenaga, serta kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir.

- b. Data sekunder, diperoleh dari berbagai sumber dengan cara menelaah buku-buku, dokumen, laporan pelaksanaan pembangunan, serta mengutip dan mencatat berbagai informasi dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder antara lain: keadaan wilayah, jumlah penduduk, struktur umur, jumlah Kepala Keluarga, jenis mata pencaharian penduduk, dan berbagai laporan hasil kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen, yaitu:

1. Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung ditujukan terhadap

objek yang menjadi sasaran penelitian, gunanya untuk memahami kondisi dan potensi yang ada di lokasi penelitian.

2. Kuisisioner

Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan terhadap beberapa orang yang berada di lokasi penelitian dan dianggap layak dapat memberikan informasi

3. Pengumpulan data sekunder pada instansi-instansi terkait.

G. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan masalah Pertama bagaimana bagaimana upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa di sekitar Desa Maritaing yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang dilakukan sesuai hasil pembahasan dengan menguraikan secara jelas apa yang ada dilapangan dan disertai perbandingan.
2. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa disekitar Desa Maritaing dengan menggunakan :

a. Metode Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis variabel yang dinyatakan dengan sebaran frekuensi berupa angka mutlak dan presentase.

Rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Dimana :

P = Presentase

f = Frekuensi

n = Jumlah frekuensi dari responden

b. Metode Analisis Pembobotan

Metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa. Berdasarkan kuisisioner yang disebarakan pada kawasan ini, sistem perhitungan dalam metode pembobotan yang dilakukan adalah dengan menentukan tiga klasifikasi bobot penilaian antara lain : kategori aman dengan bobot 0-1 (tinggi), kategori cukup aman dengan bobot 2-3 (sedang), kategori kurang aman >3 (rendah), menurut Sumaatmaja, 1988:175

c. Analisis Chi-Kuadrat (χ^2)

$$\chi^2 = \frac{(f_o - fh)^2}{fh}$$

Keterangan: χ^2 : Chi-Kuadrat

f_o : Frekuensi Observasi

f_h : Frekuensi Harapan

Selanjutnya untuk mengetahui frekuensi yang diharapkan, digunakan rumus :

$$f_h = \frac{(n_{io} - n_{oj})}{N}$$

Dimana :

f_h : Frekuensi yang diharapkan

n_{io} : Jumlah baris

n_{oj} : Jumlah kolom

N : Jumlah sampel

Sumber. Sugiyono (1999:175)

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila keadaan berikut dicapai, yakni : χ^2 hitung < χ^2 tabel yang berarti H_0 diterima, sebaliknya apa bila χ^2 hitung > χ^2 tabel berarti H_0 ditolak atau diterima H_1 .

Untuk mengetahui koefisien korelasi variabel X terhadap variabel Y berdasarkan hasil yang diperoleh, gunakan uji kontingensi, yaitu :

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{(N+x^2)}} \quad C_{\max} = \sqrt{\frac{m}{m-1}}$$

Dimana :

C : Hasil koefisien kontingensi

C_{max} : Hasil maksimal koefisien kontingensi

X² : Hasil Chi-kuadrat yang dihitung

N : Jumlah sampel

Sumber: Husaini, Purnomo (2008:277)

Untuk mengetahui besarnya hubungan variabel X dengan Y digunakan sebagai patokan interpretase nilai persentase yang digunakan, yaitu :

Tabel 3.1

Skala Nilai Hasil Uji Kontingensi

Nilai IKH	Sebutan
0,80 – 1,00	Hubungan sangat kuat
0,60 – 0,79	Hubungan kuat
0,40 – 0,59	Hubungan sedang
0,20 – 0,39	Hubungan lemah
0,00 – 0,19	Hubungan sangat lemah

Sumber: Maria M.L 2000 dalam Arianti (2009:11)

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Alor Timur

1. Letak Geografis

Kecamatan Alor Timur merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) Kecamatan yang terdapat pada wilayah Kabupaten Alor, yang secara Geografis berada pada pualu Alor bagian timur. Luas Kecamatan Alor timur 562,76 Km² dengan letak di antara Koordinat 124°50"00 BT -- 125°6"00 BT dan 08°09"00 LS -- 08°36"00 LS

Secara Administratif, Kecamatan Alor Timur Berbatasan Langsung Dengan :

Sebelah Utara : Laut Flores

Sebelah Selatan : Selat Ombay dan Kecamatan Pureman

Sebelah Timur : Selat Wetar

Sebelah Barat : Kecamatan Alor Timur Laut dan Pureman

Kecamatan Alor Timur mempunyai Wilayah Administratif Terdiri dari 10 Desa/Kelurahan dan 21 Dusun. Untuk data lebih jelas, dapat dilihat pada **Tabel 4.1 dan Gambar 4.1** berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di
Kecamatan Alor Timur

No.	Desa/Kelurahan	Luas Lahan (Ha)	Prosentase (%)
1.	Elok	3.319,89	5,90
2.	Maritaing	3.215,55	5,71
3.	Kolana Selatan	12.738,00	22,63
4.	Kolana Utara	7.770,50	13,81
5.	Mausamang	9.093,53	16,16
6.	Tanglapui Timur	4.548,39	8,08
7.	Tanglapui	4.512,59	8,08
8.	Belemana	1.132,17	2,01
9.	Padang Panjang	5.980,44	10,63
10.	Maukuru	39,65	7,05
Jumlah		52311,06	100,00

Sumber: Kecamatan Dalam Angka 2016

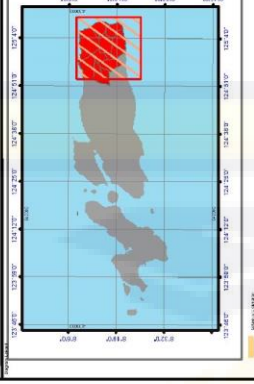


PRODI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA

PETA ADMINISTRATIF KECAMATAN ALOR TIMUR



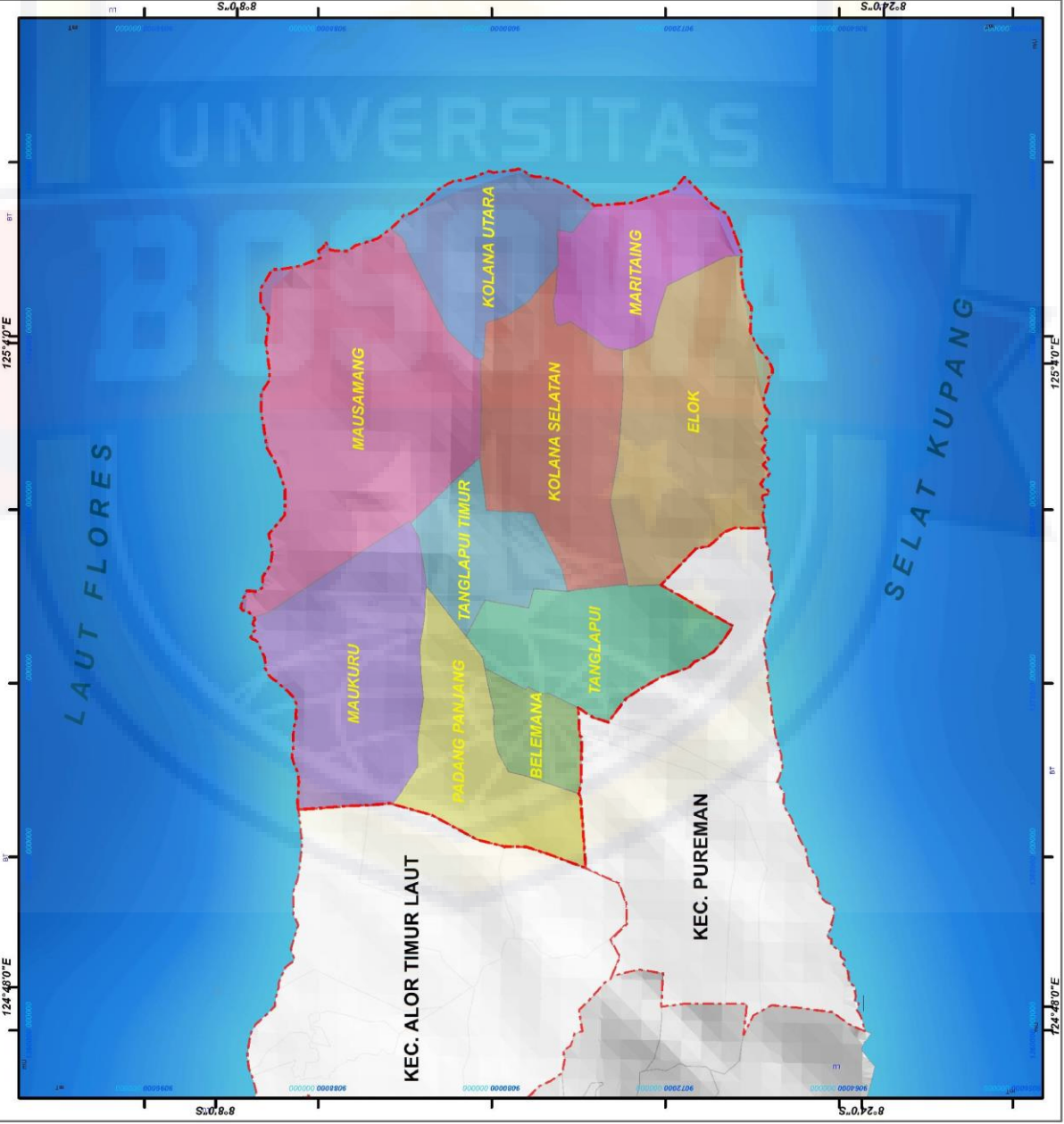
Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Sistem Koordinat: UTM
Zona: 49 S



- KETERANGAN**
- BATAS ADMINISTRATIF
- DESA**
- BELEMANA
 - ELOK
 - KOLANA SELATAN
 - KOLANA UTARA
 - MARITAING
 - MAUKURU
 - MAUSAMANG
 - PADANG PANJANG
 - TANGLAPUJ
 - TANGLAPUJ TIMUR

MAHESWA
YOYAKIM F SELLY / 45100420042

DAFTAR PUSTAKA
- Peta RRI skala 1:250.000, Balokontinental Tahun 2012
- Peta RTM Kabupaten Kabupaten Alor
- Peta RTM Kabupaten Kabupaten Alor
- Citra Satelit Google Maps Tahun 2017
KETERANGAN
- Peta ini dibuat menggunakan perangkat lunak ArcGIS dan Google Earth
- Peta ini dibuat menggunakan data yang telah ada sebelumnya
- Peta ini dibuat menggunakan data yang telah ada sebelumnya



2. Topogrfi dan Kelerengan

Kondisi topografi Kecamatan Alor Timur lebih dominan kawasan berbukit, karena wilayah Kabupaten Alor sebagian besar kawasan pegunungan. Kondisi geomorfologi dan topografi di wilayah Kecamatan Alor Timur sebagian besar berada di atas 12,5 meter sampai dengan 1.800 m/dpl. Adapun topografi dan kelerengan sebagaimana pada tabel berikut :

Kemiringan lereng pada kecamatan Alor Timur mulai dari 0-40° Desa Kolana Utara yang memiliki luas wilayah paling besar kemiringan lerengnya 2,75 ha > 40°, untuk lebih jelas tingkat kemiringan lereng ada pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Luas Wilayah Menurut Kelerengan diKecamatan Alor Timur

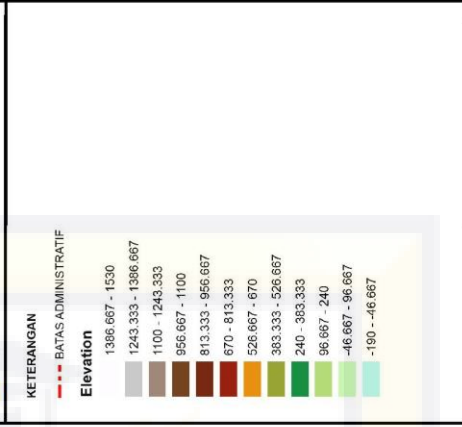
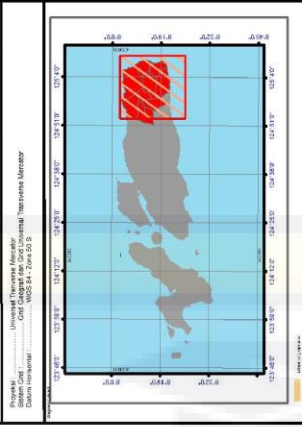
No	Klas Lereng	Luas (Km)
1	0-02	11,49
2	02-15	184,13
3	15-25	171,87
4	25-40	141,01
5	>40	54,25
Jumlah		562,76

Sumber : Bappeda Kabupaten Alor 2015



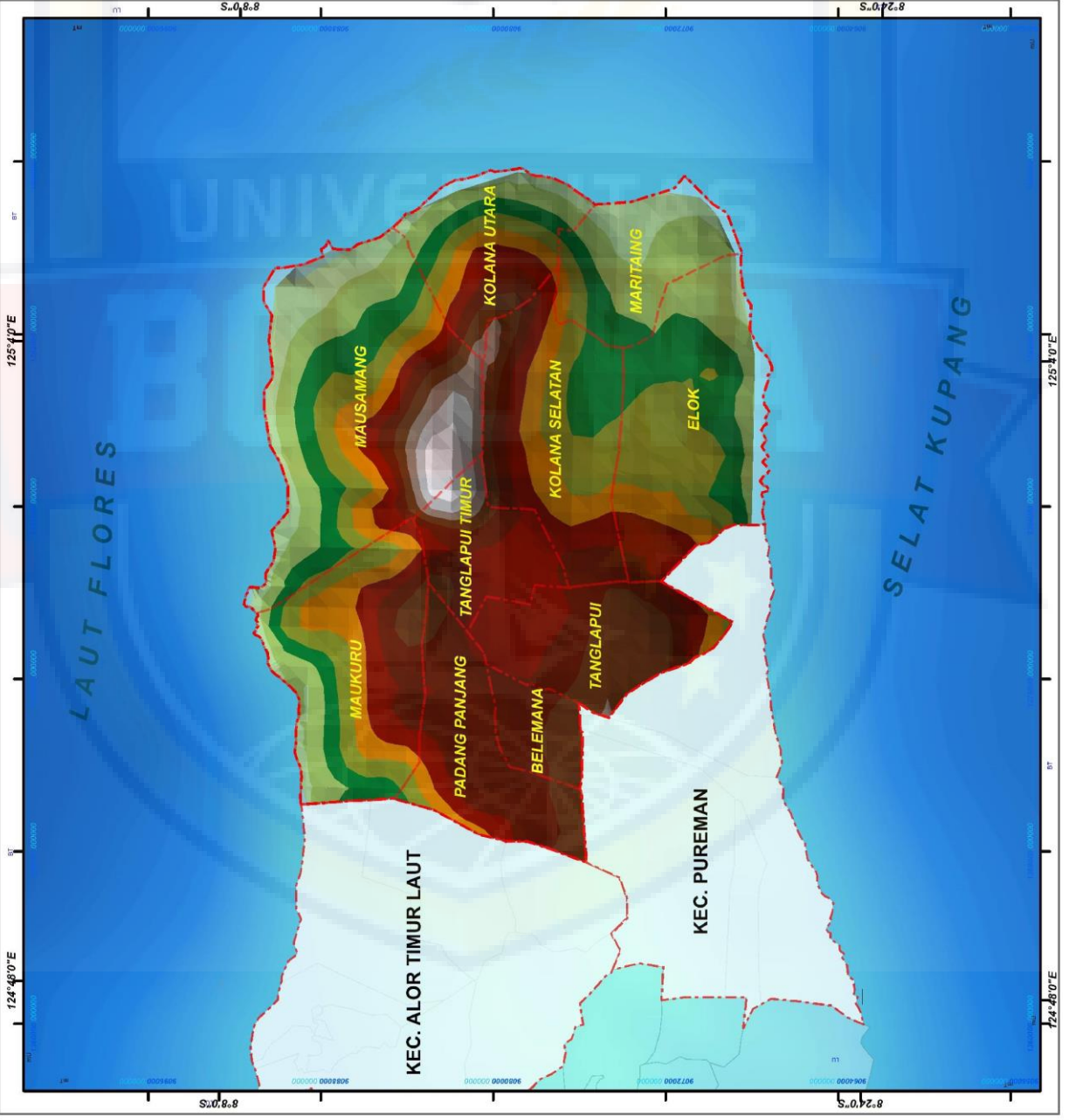
PRODI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA

PETA TOPOGRAFI KECAMATAN ALOR TIMUR



MAHASISWA
YOYAKIM F SELLY / 45100420042

SUMBER PETA
 - Peta Topografi 1:250,000
 - Peta RTM Kabupaten Kupang Alor
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2010
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2011
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2012
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2013
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2014
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2015
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2016
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2017
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2018
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2019
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2020
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2021
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2022
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2023
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2024
 - Peta Desa (PODES) Tahun 2025



3. Geologi dan Jenis Batuan

Pada umumnya kandungan geologi wilayah Kecamatan Alor Timur terbentuk oleh aktifitas gunung berapi yang terdiri dari lava, breksi, aglomerat dan tufa dengan akuifer produktifitas sedang. Berdasarkan komposisi dan sebaran litologinya, juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas, maka secara stratigrafi Kecamatan Alor Timur dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu aluvium, Batugamping koral, Formasi Alor dan formasi tanahau.

Jenis batuan di kecamatan Alor Timur didominasi dengan jenis batuan gunung api subareal dengan luas 473,20 dengan untuk lebih jelasnya lihat pada tabel dan peta jenis batuan berikut.

Tabel 4.3
Luas Wilayah Menurut Jenis batuan di
Kecamatan Alor Timur

No	Jenis Batuan	Klas Litologi	Luas
1	Gunungapi: subareal	Batuan ekstrusi: menengah: lava	473,20
2	Litoral: terumbu	Sedimen : Kimia : Batugamping	41,03
3	Terrestrial: lakustrin	Sedimen: klastika: konglomerat	48,52

Sumber : Bappeda Kabupaten Alor 2015

4. Jenis Tanah

Secara umum Wilayah Kabupaten Alor dapat dikelompokkan kedalam beberapa group fisiografi seperti Pengunungan, Perbukitan, Teras, Dataran serta Dataran Pantai. Group fisiografi tersebut secara lebih detail berdasarkan karakteristik fisik geologis dikelompokkan lagi menjadi Sistem Lahan (*Land System*). Berdasarkan sistem lahannya, di Kabupaten Alor dapat dijumpai 21 (dua puluh satu) unit Sistem Lahan yang tersebar mulai dari pegunungan sampai ke dataran pantai. Untuk tanah Kecamatan Alor timur terdapat 7 (tujuh) lahan sistem yang sebarannya didominasi oleh sistem lahan GBG (Gunung Beliling) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta jenis tanah berikut.

5. Iklim

Iklim yang tidak menentu menjadi masalah yang cukup klasik di Kabupaten Alor dalam setahun musim penghujan relative lebih pendek dari pada musim kemarau. Pada tahun 2013 temperatur udara terendah adalah 19,20°C yang terjadi pada bulan Agustus sedangkan temperature tertinggi adalah 33,20°C pada bulan September. Curah hujan tertinggi adalah 371,10 mm pada bulan Januari, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Semua ukuran adalah untuk kota Kalabahi, ibukota Kabupaten Alor, yang dapat dijadikan gambaran umum untuk kabupaten Alor

6. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan disuatu wilayah merupakan gambaran aktifitas manusia, baik dalam rangka kegiatan sosial maupun dalam rangka kegiatan ekonomi yang merupakan indikator atau tolak ukur berkembang tidaknya suatu wilayah.

Penggunaan lahan di Kecamatan Alor Timur akhir Tahun 2015 terdiri dari perkampungan, persawahan, kebun campuran, tegalan, dan lain-lain. Penggunaan lahan yang terbesar adalah semakin besar wilayah Kecamatan Alor Timur adalah semakin belukar . Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Kecamatan Alor Timur dapat dilihat peta penggunaan lahan

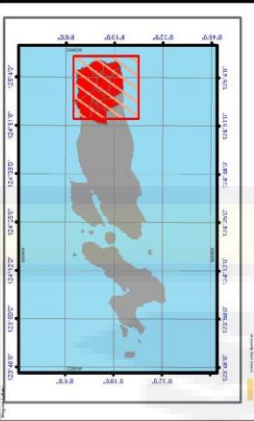
7. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kecamatan Alor Timur pada akhir Tahun 2014 adalah 7.828 jiwa. Dimana kepadatan penduduk Kecamatan Alor Timur secara geografis, kepadatan tertinggi terdapat di Desa Maritaing 32, jiwa/Km² dan kepadatan terendah di Desa Mausamang sebesar 6 jiwa/Km². Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Luas Wilayah Desa/Kelurahan Menurut Kepadatan Penduduk di
Kecamatan Alor Timur

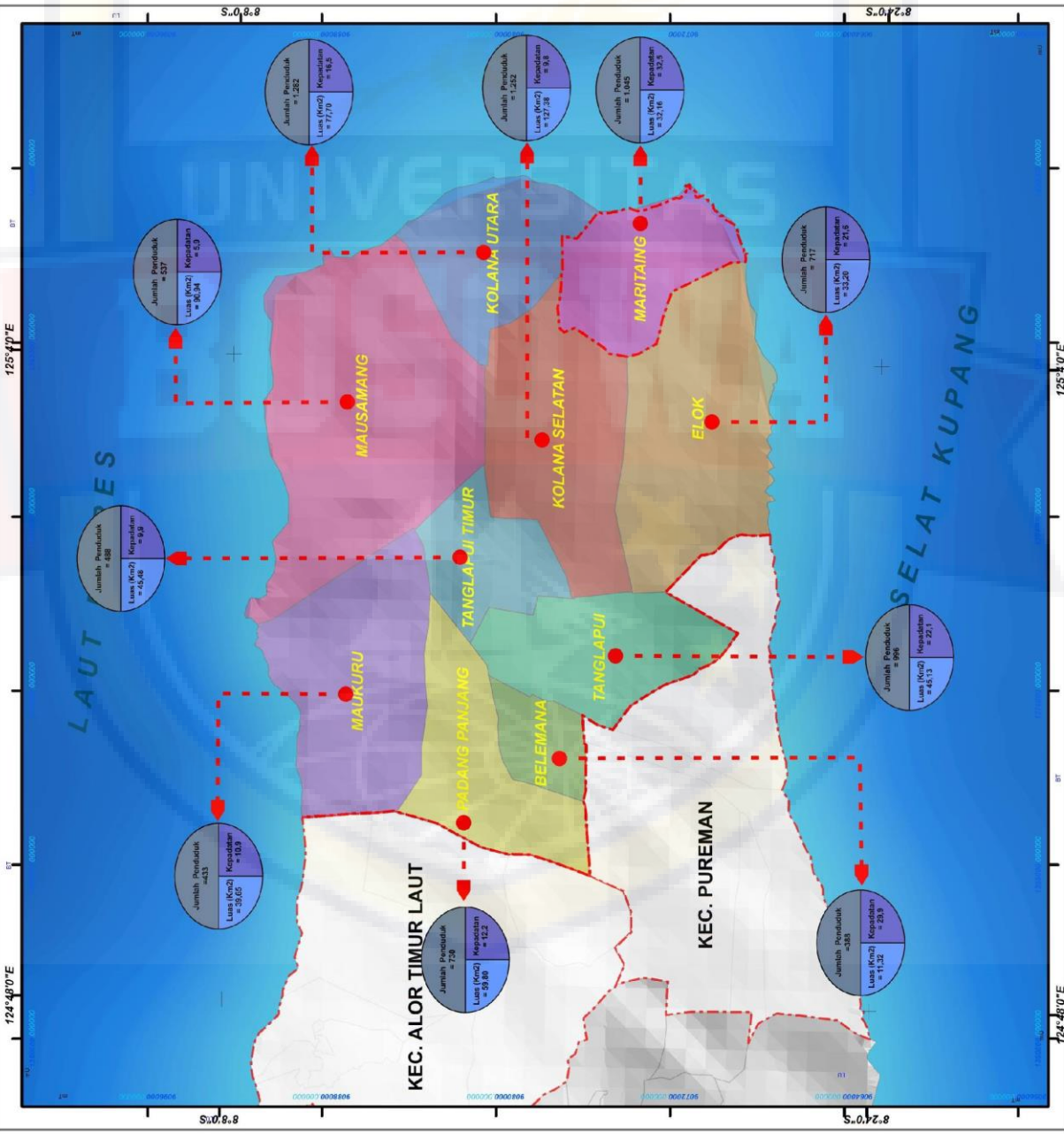
No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas daerah (Km2)	Kepadatan Penduduk
1	Elok	717	33,20	21,6
2	Maritaing	1.045	32,16	32,5
3	Kolana Selatan	1.252	127,38	9,8
4	Kolana Utara	1.282	77,70	16,5
5	Mausamang	537	90,94	5,9
6	Tanglapui Timur	448	45,48	9,9
7	Tanglapui	996	45,13	22,1
8	Belemana	388	11,32	29,9
9	Padang Panjang	730	59,80	12,2
10	Maukuru	433	39,65	10,9
Jumlah		7.828	562,76	13,9

Sumber : BPS Kecamatan dalam angka tahun 2015



KETERANGAN

- - - - - BATAS ADMINISTRATIF
 ■ BELEMANA
 ■ ELOK
 ■ KOLANA SELATAN
 ■ KOLANA UTARA
 ■ MARITANG
 ■ MAUKURU
 ■ MAUSAMANG
 ■ PADANG PANJANG
 ■ TANGLAPU
 ■ TANGLAPU TIMUR



8. Kondisi Sarana

a. Kondisi Sarana Pendidikan

Pada tahun 2014 di Kecamatan Alor timur jumlah sekolah dibidang pendidikan formal, untuk taman kanak-kanak sebanyak 9 dengan status 1 negeri dan 8 swasta .Sekola Dasar sebanyak 20 sekolah denga perincihan 7 sekolah swasta dan 13 sekolah negeri. SMP sebanyak 7 SMP (Negeri) dan SMA sebanyak 2 Sekolah (Negeri) Untuk lebih jelas Lihat pada Tabel Berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Sekolah menurut Status dan Tingkat Pendidikan
Dirinci tiap Desa/Kelurahan Tahun Pelajaran 2014/2015

No	Desa/ Kelurahan	TK		SD		SMP		SMA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Elok	-	-	2	1	1	-	-	-
2	Maritaing	1	1	2	-	1	-	1	-
3	Kolana Selatan	-	1	2	1	1	-	-	-
4	Kolana Utara	-	2	2	1	1	-	1	-
5	Mausamang	-	1	1	1	1	-	-	-
6	Tanglapui Timur	-	1	1	-	-	-	-	-
7	Tanglapui	-	-	1	1	1	-	1	-
8	Belemana	-	1	-	1	-	-	-	-
9	Padang Panjang	-	1	1	1	1	-	-	-
10	Maukuru	-	-	2	-	-	-	-	-
Jumlah		1	8	13	7	7	-	3	-

Sumber Kecamatan Alor Timur Dalam Angka Tahun 2015

b. Kondisi Sarana kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu tersedianya sarana dan prasarana kesehatan adalah sangat penting pembanguna kesehatan di Kecamatan Alor Timur diarahkan pada prioritas untuk memberikan pelayanan yang mudah, merata, murah kepada masyarakat dengan beberapa fasilitas seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu, Polindes, Posyandu serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat, seperti meningkatkan gizi masyarakat khususnya usia Bayi/Balita, serta penganggulangan dan pemcegahan terhadap penyakit. Pada tahun 2014 di Kecamatan Alor Timur terdapat 2 Puskesmas, 2 Puskesmas Pembantu, 4 Polindes dan 27 posyandu. Untuk data lebih lengkap, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Jenisnya

Dirinci tiap Desa/Kelurahan Tahun 2015

N o	Desa/ Kelurahan	Rumah Sakit	Puskemas	Puskesmas Pembantu	Polindes/ Poskesdes	Posy andu
1	Elok	-	-	-	1	3
2	Maritaing	-	1	-	-	2
3	Kolana Selatan	-	-	-	-	3
4	Kolana Utara	-	-	-	-	3
5	Mausamang	-	-	1	-	2
6	Tanglapui Timur	-	-	-	1	2
7	Tanglapui	-	1	-	-	4
8	Belemana	-	-	-	1	2
9	Padang Panjang	-	-	1	-	3
10	Maukuru	-	-	-	1	3
Jumlah		-	2	2	4	27

Sumber Kecamatan Alor Timur Dalam Angka Tahun 2015

c. Peribadatan

Ketersediaan sarana Peribadatan sangat menunjang kegiatan rohani masyarakat di kecamatan Alor Timur seluruh desa di Kecamatan Alor Timur memiliki tempat ibadah (gereja). Pada tahun 2014 terdapat 36 Gereja protestan .

Tabel 4.7
Jumlah Tempat Ibadah menurut Agama

**Dirinci tiap Desa/Kelurahan
Tahun 2015**

No	Desa/ Kelurahan	Masjid	Pura	Gereja	Wihara
1	Elok	-	-	3	-
2	Maritaing	-	-	2	-
3	Kolana Selatan	-	-	4	-
4	Kolana Utara	-	-	2	-
5	Mausamang	-	-	2	-
6	Tanglapui Timur	-	-	2	-
7	Tanglapui	-	-	7	-
8	Belemana	-	-	1	-
9	Padang Panjang	-	-	7	-
10	Maukuru	-	-	6	-
Jumlah		-	-	36	-

Sumber Kecamatan Alor Timur Dalam Angka Tahun 2015

9. Aspek Prasarana

a. Jaringan Jalan

Jalan merupakan satu prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar roda kegiatan ekonomi masyarakat. Usaha pembangunan yang makin meningkat menuntut adanya sarana transportasi yang memadai untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke daerah. Dimana Jaringan Jalan yang berada di Kecamatan Alor Timur terdiri atas beberapa Klasifikasi, yaitu antara lain Jalan Arteri Primer, Kolektor Sekunder, dan Jalan Lokal. Adapun pembagian

Klasifikasi terhadap kondisi Jalan yang terdapat di Kecamatan Alor Timur dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.8
Jenis Dan Kondisi Jalan Di Kecamatan Alor Timur
Tahun 2012

No	Fungsi Jalan	Kondisi
1	Arteri	Baik
2	Kolektor	Baik
3	Lokal	Baik

Sumber : Kantor Kecamatan Alor Timur, Tahun 2015

b. Jaringan Air Bersih

Air bersih merupakan unsur penunjang kehidupan dan sangat berpengaruh terhadap kondisi suatu penduduk. Hal ini disebabkan karena air bersih merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa tidak terpenuhi (harus terpenuhi) di Kecamatan Alor Timur sumber pemakaiaan air bersih diklasifikasi menjadi tiga berdasarkan sumbernya yaitu air bersih yang bersumber dari PDAM, sumur galian dan sumur bor. Dari hasil kompilasi data terbikti bahwa mayoritas penduduk di Kota Alor mengkonsumsi air yang bersumber dari PDAM dan juga penduduk minoritas menkonsumsi air bersih yang bersumber dari sumur bor. Adapun kualitas air, baik air yang bersumber dari PDAM, sumur galian maupun sumur bor ketiga-tiganya mempunyai kualitas yang baik.

c. Jaringan Drainase.

Sistem drainase di Kecamatan Alor Timur secara umum menggunakan saluran parmanen. Hal ini dapat dilihat dari hampir semua ruas jalan yang ada di kecamatan Alor Timur menggunakan drainase permanen, ada pun beberapa saluran drainase yang non permanen itupun berada pada sekitar jalan lingkungan / disekitar pedesaan oleh karena itu harus direncanakan sistem jaringan drainasenya secara hierarkis berdasarkan fungsionalitas masing-masing jaringan, untuk menghindari terjadinya genangan air karena sangat berpotensi pada penurunan kualitas lingkungan permukiman.

Adapun jaringan drainase yang terdapat di Kecamatan Alor Timur dapat di bagi menjadi 3 bagian sesuai fungsinya yaitu, drainase permanen, drainase semi permanent, dan drainase temporer (tanah). Ketiga drainase menurut jenis dan fungsinya memiliki ukuran yang berbeda-beda.

d. Jaringan Telepon

Jaringan telekomunikasi merupakan prasarana yang menghubungkan antara dua orang yang mempunyai tempat yang berjauhan dengan cara berkomunikasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi antara orang yang berjauhan tempat

terutama pada jarak yang dapat ditempuh jika hanya melakukan perjalanan sehari-hari.

Dari uraian ini di Kecamatan Alor Timur penyebaran jaringan telekomunikasinya sudah cukup merata terutama pada tempat dimana penduduk sangat membutuhkannya. Adapun penyediaan sarana komunikasi dengan adanya jaringan yang telah disediakan yaitu penyediaan berupa warung telekomunikasi dan telepon umum. Namun fasilitas ini tidak semua orang menggunakannya. Hal ini disebabkan banyak penduduk yang hanya mempunyai fasilitas komunikasi pribadi (berupa HP)

e. Jaringan Persampahan

Pada umumnya sampah sama pentingnya dengan penyediaan jaringan drainase yang tidak kalah pentingnya. Sampah sendiri sangat berpengaruh terhadap lingkungan suatu kawasan lingkungan terutama terhadap lingkungan hidup yang sering disebut dengan lingkungan sehat yang identik dengan kebersihan. Hal ini kemudian menyebabkan perlu disediakan fasilitas yang dapat menanggulangi masalah sampah.

Di kecamatan Alor Timur penanggulangan sampahnya sama dengan dengan menggunakan sistem bakau sendiri dirumah dan dengan cara menggali dan menguburkan (Sampah)

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Batas Administrasi dan Letak Geografis

Desa Maritaing merupakan salah satu Desa yang terletak Kecamatan Alot Timur Kabupaten Alor yang terdiri dari 6 (enam) RW dan 37 RT serta luas wilayahnya 33,20 Km². Secara administrasi memiliki batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kolana Utara
- Sebelah Selatan : Selat Ombay dan Kecamatan Pureman
- Sebelah Timur : Selat Wetar
- Sebelah Barat : Desa Kolana Selatan dan Desa Elok

BOSOWA





PRODI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA

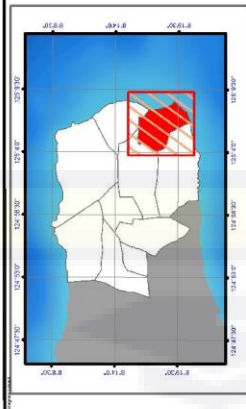
PETA ADMINISTRATIF DESA MARTANGI

SKALA : 1:50.000



Proyek ini didukung oleh Universitas Bosowa dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Penyusun: Yoyakim F Selly, M. Eng, M. Sc., Ph.D., Dosen Tetap Universitas Bosowa



KETERANGAN

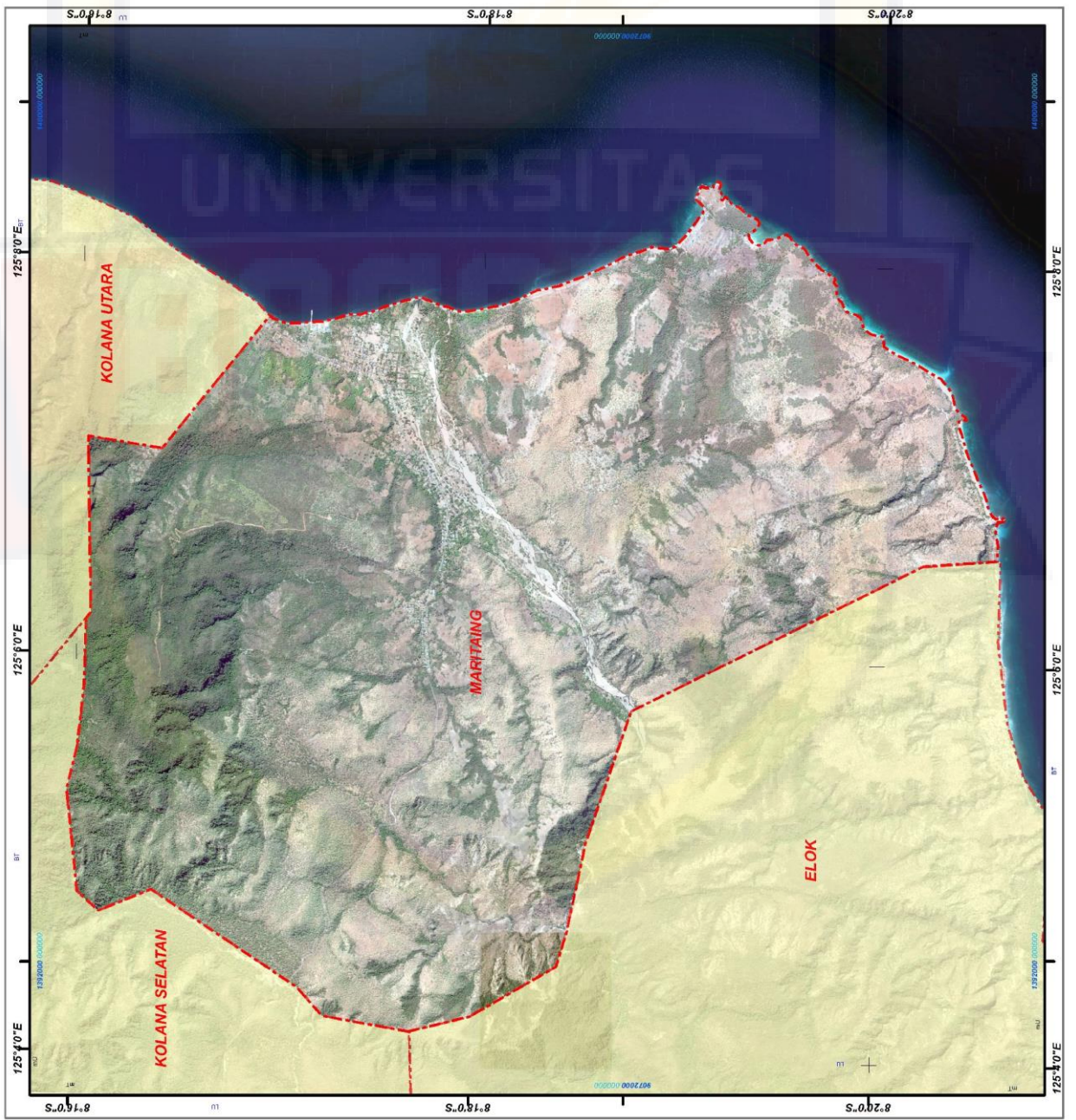
--- Batas Administratif

--- Delinasi Kawasan Penelitian

MH4583BWA

YOYAKIM F SELLY / 45100420042

SUMBER PETA
- Peta Raster 200m, Badan Informasi Geospasial Tahun 2012
- Peta RITNY Kabupaten Kabupaten Aia
- Peta Desa (PODES) Tahun 2010
- Peta Raster Google Earth Tahun 2017
- Peta Raster Google Earth Tahun 2017
- Peta Raster Google Earth Tahun 2017
- Peta Raster Google Earth Tahun 2017



2. Topogrfi dan Kelerengan

Kondisi topografi Desa Maritaing lebih dominan kawasan berbukit, karena wilayah Kabupaten Maritaing sebagian besar kawasan pegunungan. Kondisi geomorfologi dan topografi di wilayah Desa Maritaing sebagian besar berada di atas 12,5 meter sampai dengan 1.800 m/dpl. Adapun topografi dan kelerengan sebagaimana pada tabel berikut :

Kemiringan lereng pada Desa Maritaing mulai dari 0-40° yang memiliki luas wilayah paling besar kemiringan lerengnya 2,75 ha > 40°, untuk lebih jelas tingkat kemiringan lereng ada pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Luas Wilayah Menurut Kelerengan di Desa Maritaing

No	Klas Lereng	Luas (Km)
1	0-02	11,49
2	02-15	184,13
3	15-25	171,87
4	25-40	141,01
5	>40	54,25
	Jumlah	562,76

Sumber : Bappeda Kabupaten Maritaing 2015

3. Geologi dan Jenis Batuan

Pada umumnya kandungan geologi wilayah Desa Maritaing terbentuk oleh aktifitas gunung berapi yang terdiri dari lava, breksi, aglomerat dan tuva dengan akuifer produktifitas sedang. Berdasarkan komposisi dan sebaran litologinya, juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas, maka secara stratigrafi Desa Maritaing dapat dibedakan menjadi beberapa yaitu aluvium, Batugamping koral, Formasi Maritaing dan formasi tanahau

Jenis batuan di Desa Maritaing didominasi dengan jenis batuan gunung api subareal dengan luas 473,20 dengan untuk lebih jelasnya lihat pada tabel dan peta jenis batuan berikut

Tabel 4.10
Luas Wilayah Menurut Jenis batuan di
Desa Maritaing

No	Jenis Batuan	Klas Litologi	Luas
1	Gunungapi: subareal	Batuan ekstrusi: menengah: lava	473,20
2	Litoral: terumbu	Sedimen : Kimia : Batugamping	41,03
3	Terrestrial: lakustrin	Sedimen: klastika: konglomerat	48,52

Sumber : Bappeda Kabupaten Maritaing 2016

4. Jenis Tanah

Secara umum Wilayah Kabupaten Alor dapat dikelompokkan ke dalam beberapa group fisiografi seperti Pengunungan, Perbukitan, Teras, Dataran serta Dataran Pantai. Group fisiografi tersebut secara

lebih detail berdasarkan karakteristik fisik geologis dikelompokkan lagi menjadi Sistem Lahan (*Land System*). Berdasarkan sistem lahannya, di Kabupaten Alor dapat dijumpai 21 (dua puluh satu) unit Sistem Lahan yang tersebar mulai dari pegunungan sampai ke dataran pantai. Untuk tanah Desa Maritaing terdapat 7 (tujuh) lahan sistem yang sebaranya di dominasi oleh sistem lahan GBG (Gunung Beliling) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta jenis tanah berikut.

5. Iklim

Iklim yang tidak menentu menjadi masalah yang cukup klasik di Kabupaten Maritaing dalam setahun musim penghujan relative lebih pendek dari pada musim kemarau. Pada tahun 2013 temperatur udara terendah adalah 19,20°C yang terjadi pada bulan Agustus sedangkan temperature tertinggi adalah 33,20°C pada bulan September. Curah hujan tertinggi adalah 371,10 mm pada bulan Januari, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Semua ukuran adalah untuk desa Maritaing Kecamatan Alor Timur, yang dapat dijadikan gambaran umum untuk kabupaten Alor.

6. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan disuatu wilayah merupakan gambaran aktifitas manusia, baik dalam rangka kegiatan sosial maupun dalam

rangka kegiatan ekonomi yang merupakan indikator atau tolak ukur berkembang tidaknya suatu wilayah.

Penggunaan lahan di Desa Maritaing akhir Tahun 2015 terdiri dari perkampungan, persawahan, kebun campuran, tegalan, dan lain-lain. Penggunaan lahan yang terbesar adalah semakin besar wilayah Desa Maritaing adalah semakin besar. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Desa Maritaing dapat dilihat peta penggunaan lahan.

UNIVERSITAS

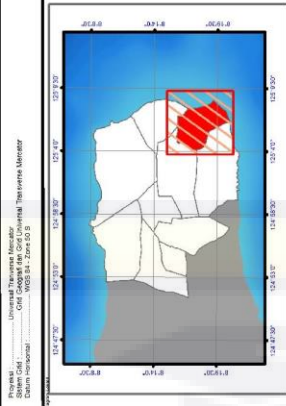
BOSOWA





PRODI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA

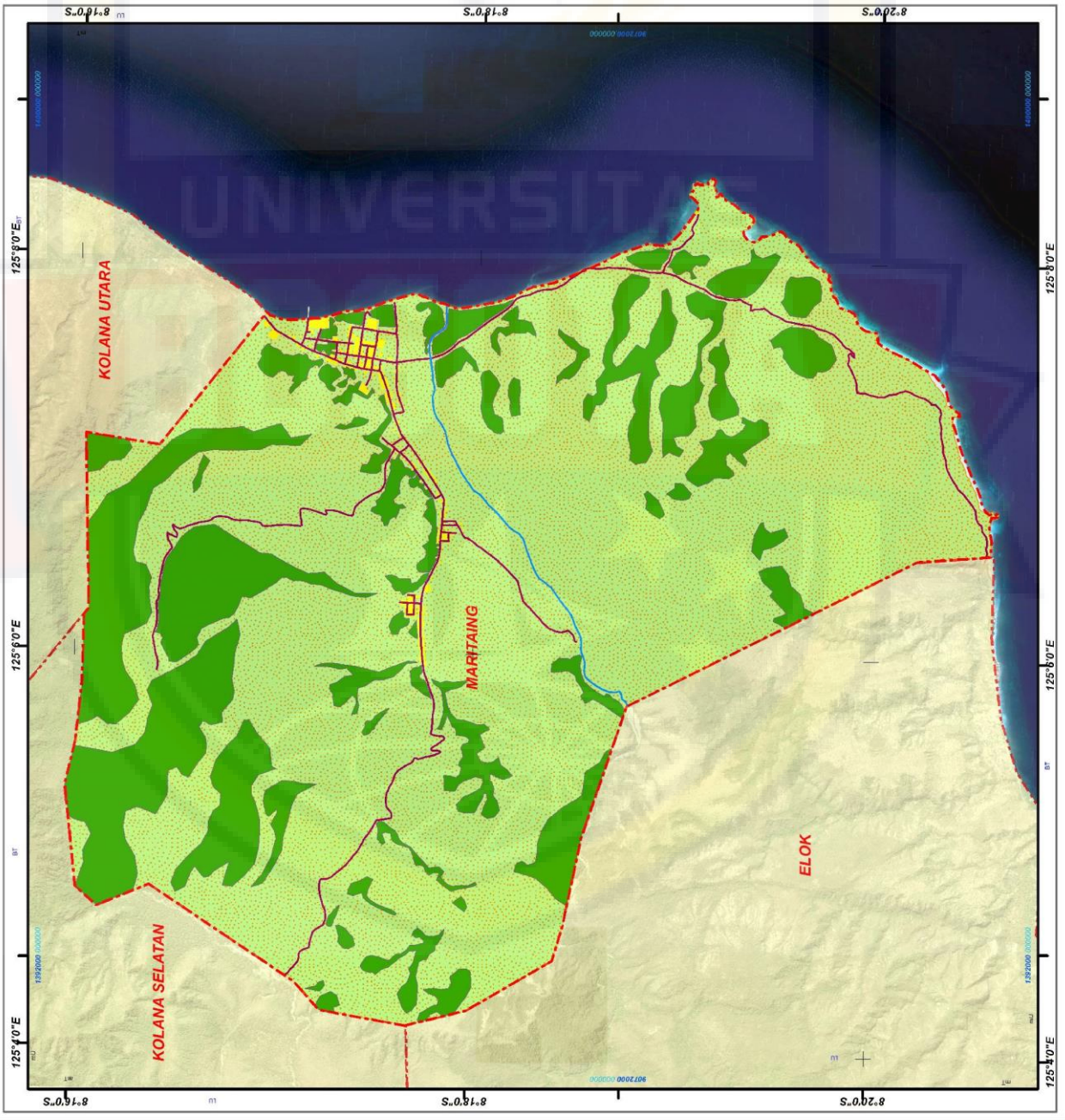
PETA PENGGUNAAN LAHAN DESA MARITANGI



- KETERANGAN**
- Batas Administratif
 - Sungai
 - Jalan
 - Pemukiman
 - Kebun_campuran
 - Lahan_terbuka
- Penggunaan Lahan**

MAHASISWA
YOYAKIM F SELLY / 45100420042

SUMBER PETA :
- Peta Rupa Bumi Sulawesi Tahun 2012
- Peta Rupa Bumi Kabupaten Maritangi
- Potensi Desa (PODES) Tahun 2010
- Data Koordinat Google Earth Tahun 2017
- Data Citra Satelit Google Earth Tahun 2015
Peta ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS dan Google Earth. Semua perovakan: Banjar, Agustus 2017.



C. Aspek Kependudukan

1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa MAritaing pada tahun 2013 sebanyak 1.035 Jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 1.035 jiwa, namun kemudian mengalami penurunan penduduk di tahun 2017 menjadi 1.045 jiwa, secara rata-rata Kelurahan MAritaing menunjukkan tingkat pertumbuhan yang negatif atau menurun dalam lima tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Jumlah dan Perkembangan penduduk di Desa Maritaing
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertambahan (jiwa)
1	2013	1.035	-
2	2014	1.035	-
3	2015	1.040	5
4	2016	1.044	4
5	2017	1.045	1
Jumlah			10

Sumber : Kantor Desa MAritaing Tahun 2016

2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Desa MAritaing pada Tahun 2016 berjumlah 1.045 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 541 jiwa dan

perempuan berjumlah 504 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di
Desa Maritaing Tahun 2017

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Maritaing	541	504	1.045
Jumlah		541	504	1.045

Sumber : Kantor Desa MAritaing Tahun 2016

3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Umur merupakan salah satu tolak ukur dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, dalam hal ini umur setiap manusia selalu mempengaruhi aktifitasnya sehari-hari. Jumlah penduduk menurut kelompok umur secara keseluruhan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Desa Maritaing Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0 - 4	38	36	74
2	5 - 9	39	36	75
3	10 - 14	40	32	72
4	15 - 19	43	35	78
5	20 - 24	40	41	81
6	25 - 29	36	36	72
7	30 - 34	38	36	74
8	35 - 39	45	34	79
9	40 - 44	36	38	74
10	45 - 49	37	38	75
11	50 - 54	34	32	76
12	55 - 59	37	37	74
13	60 - 64	36	37	73
14	65 +	29	31	60
Jumlah				1.045

Sumber : Kantor Desa MARitaing Tahun 2016

4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Agama

Struktur penduduk dan kepercayaan di Desa MARitaing didominasi oleh pemeluk Agama kristen dengan jumlah 1.045. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut Agama dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.14
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa MAritaing
Tahun 2016

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	-	-
2	Protestan	1.045	100
3	Katolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah		1.045	100

Sumber : Kantor Desa MAritaing Tahun 2016

5. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat mata pencaharian di Desa MAritaing berjumlah 746 Jiwa yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 15 jiwa, Petani berjumlah 681 jiwa, Pedagang berjumlah 17 jiwa, Nelayan berjumlah 18 jiwa, Bidan Swasta berjumlah 5 jiwa, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Desa Maritaing berdasarkan Mata Pencaharian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.15
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahrian
Di Desa Maritaing Tahun 2016

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pegawai Negri Sipil	15	2,01
2	Petani	681	91,28
3	Pedagang	17	2,27
4	Nelayan	18	2,41
5	Bidan Swasta	5	0,67
6	Lain-lain	10	1,34
Jumlah		746	100

Sumber : Kantor Desa MARitaing Tahun 2016

D. Sosial Budaya

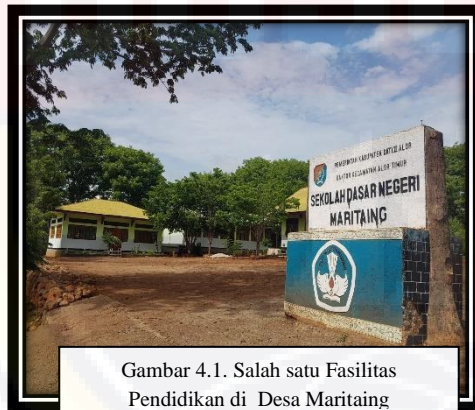
Terjadinya perubahan kultur dan sosial budaya masyarakat merupakan proses transformasi global akibat tidak homogenitasnya kultur budaya pada suatu daerah. Perubahan karakter dn kultur budaya sebagai ciri khas suatu komunitas tidak perlu terjadi, jika masyarakat memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai budaya yang secara turun-temurun dianutnya. Salah satu kekuatan masyarakat di Desa Maritaing adalah pembauran nilai religius keagamaan dalam suatu kebudayaan yang masih melekat hingga kini. Faktor lain yang mempengaruhi adalah komunitas masyarakat di Desa Maritaing sebagian besar masih dalam satu ikatan rumpun keluarga, sehingga

konflik sosial tidak menjadi pemisah, tetapi dapat terselesaikan secara kebersamaan dan kekeluargaan.

Kultur budaya masyarakat di Desa Maritaing masih dipengaruhi oleh etnis budaya kolana Alor. Keragaman kultur sosial budaya yang terapat di Desa Maritaing, merupakan pembentukan etnis dan budaya lokal, secara umum masih tergolong dala Suku Kolana Alor. Perbedaan dalam hal budaya umumnya terletak pada dialeg, dan sistem upacara adat, ritual keagamaan, serta bentuk bangunan.

E. Kondisi Sarana

1. Fasilitas Pendidikan



Gambar 4.1. Salah satu Fasilitas Pendidikan di Desa Maritaing

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia adalah tingkat pemenuhan pendidikan. Sarana pendidikan yang ada di Desa MARitaing yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar

(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SMK maritaing sedangkan untuk tingkat lainnya belum terdistribusi di Desa MARitaing . Tingkat penyebaran TK hampir merata diseluruh wilayah Desa MARitaing serta akses yang sangat baik.

2. Fasilitas Kesehatan



Gambar 4.1. Salah satu Fasilitas kesehatan di Desa Maritaing

Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Adapun fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Maritaing terdiri dari: Puskesmas dan Posyandu,. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada

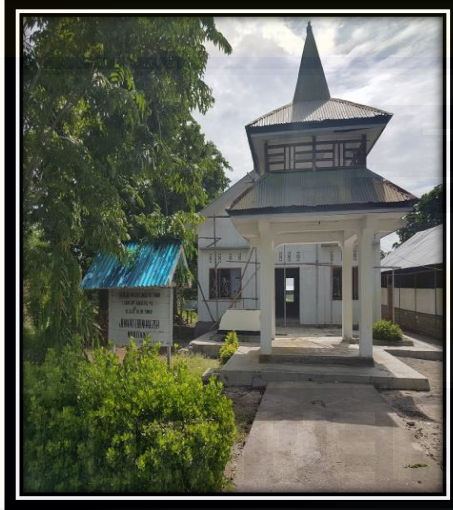
tabel berikut ini

Tabel 4.16
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Desa MARitaing
Tahun 2016

No	Agama	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	Puskesmas	1	33,33
2	Posyandu	2	66,66
Jumlah		2	100

Sumber : Kantor Desa MARitaing Tahun 2016

3. Fasilitas Peribadatan



Gambar 4.1. Salah satu Fasilitas Peribadatan di Desa Maritaing

Dalam kehidupan beragama senantiasa dibina dan ditunjang oleh tersedianya fasilitas peribadatan sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Dengan adanya fasilitas

tersebut dapat membinakan kerukunan hidup antar umat beragama.

Jumlah fasilitas peribadatan yang ada di Desa MARitaing hanya berupa Gereja yang berjumlah 2 unit, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk MARitaing beragama Kristen Protestan.

F. Kondisi Prasarana

1. Jaringan Jalan



Gambar 4.2. Kondisi Jalan di Pasar Maritaing

Jalan merupakan prasarana angkutan yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan transportasi dan kegiatan

lainnya, dan sebagai penghubung antar moda dari suatu daerah ke daerah yang lain. Kondisi jaringan jalan di Desa Maritaing tergolong cukup baik karena dilihat dari kondisi jalannya yang baik dan arus pergerakan kendaraan yang cukup lancar. Adapun kondisi jalan berlubang terdapat disekitar pasar Maritaing .

2. Jaringan Drainase

Sistem jaringan drainase yang ada di Desa Maritaing menggunakan sistem terbuka, yang terbentang di sepanjang jalan aspal dan pengerasan. Jaringan drainase yang ada terdiri dari: drainase primer dan sekunder yang mana drainase primer berupa sungai. Sebagian besar kawasan Desa MAritaing telah memiliki jaringan saluran drainase, tetapi masih banyak dijumpai kondisi jaringan yang rusak, macet atau kurang lebar. Kerusakan pada saluran drainase inilah yang menyebabkan terjadinya penyumbatan pada saluran drainase sehingga berpotensi terjadinya genangan di beberapa ruas jalan dan pada akhirnya akan bermuara pada banjir ketika datang musim hujan.

3. Jaringan Air Bersih

Air merupakan kebutuhan pokok dan unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu penyediaan air bersih yang memenuhi syarat-syarat kesehatan adalah mutlak diperlukan pada suatu wilayah perkotaan guna

memenuhi kebutuhan perumahan, pendidikan, perdagangan, rekreasi dan olahraga, serta fasilitas umum.

Masyarakat di Desa Maritaing sebagian besar menggunakan PDAM dan sumur galian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Air bersih yang ada rata-rata mempunyai kualitas secara fisik baik untuk PDAM, sumur gali tergolong kualitas tinggi dan layak dikonsumsi sebagai air minum

4. Jaringan Listrik

Jaringan listrik telah menjadi kebutuhan pokok hidup masyarakat. Listrik juga merupakan salah satu sarana produksi, tanpa listrik maka perkembangan di berbagai bidang akan berjalan lambat karena berbagai macam kegiatan sosial ekonomi banyak tergantung pada Listrik. Jaringan listrik yang ada di Desa MARitaing saat ini sudah mampu melayani hampir seluruh penduduk dan semuanya dapat difungsikan dengan baik, namun kondisinya sering mengalami gangguan teknis.

5. Jaringan Telepon

Jaringan telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mempermudah didalam melakukan komunikasi jarak jauh. Kebutuhan jaringan telepon di Desa MARitaing dilayani oleh PT. Telkom dan jaringan telepon seluler yang telah banyak berkembang. Dilihat sisi kurangnya sambungan jaringan telepon tidak begitu

menjadi masalah bagi penduduk, hal ini dikarenakan sebagian besar kebutuhan akan prasarana jaringan telepon sudah terpenuhi oleh jaringan telepon seluler. Hal ini dikarenakan biaya yang murah, praktis dan efisien.

6. Jaringan Persampahan

Pengelolaan sampah di Desa Maritaing tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kota Alor, namun sistem pengilahan sampah dilakukan oleh masyarakat di Desa Maritaing. Adapun sistem pengolahannya terdiri dari beberapa tahap yaitu pewadahan, pengumpulan, pembakaran ditempat sampah.

G. Karakteristik Responden Penelitian

Sebagai bagian penting dalam penelitian ini, maka keterlibatan masyarakat sebagai responden sangat dibutuhkan dalam memperoleh informasi atau data yang di perlukan. Jumlah responden yang diteliti dalam penelitian ini adalah 120 orang yang di ambil dari Desa Maritaing Kabupaten Alor

H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Di Desa Maritaing Kabupaten Alor

Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, faktor penting

yang dimaksud sebagaimana pada tinjauan pustaka dapat disistematis sebagai berikut :

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Dari kelompok usia menengah keatas dengan keterkaitan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

Tingkat usia yang menjadi responden sesuai jawaban responden secara umum bervariasi, tingkat usia yang terdiri dari lansia, dewasa, remaja, dan anak-anak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4..17
Tingkat Usia Menurut Responden di Desa Maritaing
Tahun 2018

No	Usia	Frekuensi (f)	Persentasei (%)
1	Lansia 55-64 Tahun Keatas	9	7,50
2	Dewasa 18-54 Tahun	66	55
3	Remaja 12-17 Tahun	30	25
4	Anak-anak 9-11 Tahun	15	12,5
Jumlah		120	100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian 2018

Dari data jumlah responden berdasarkan tingkat usia pada tabel 5.1 di atas, menunjukkan bahwa dari 120 responden yang ada berdasarkan jumlah usia lansia adalah 9 orang (7,50%), Dewasa 66 orang (55%), Remaja 30 orang (25%) dan anak-anak 15 orang (12,5%).

2. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam Desa tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan Desa tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam Desa tertentu, maka rasa memiliki terhadap Desa cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan Desa tersebut. Lamanya seseorang tinggal dalam Desa berdasarkan jawaban responden dalam penelitian ini juga sangat beragam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut

Tabel 4.18
Lamanya Tinggal Menurut Responden di Desa Maritaing
Tahun 2018

No	Lamanya Tinggal	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Selamanya	53	44,16
2	10-15 Tahun	26	21,66
3	5-10 Tahun	18	15
4	Dibawah 5 Tahun	23	19,16
Jumlah		120	100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa frekuensi responden yang lamanya tinggal selamanya 53 orang (44,16%), 10-15 tahun 26 orang (21,66%), 5-10 tahun 18 orang (15%) dan dibawah 5 tahun 23 orang (19,16%).

3. Intensitas Berinteraksi Sosial

Dalam penelitian ini dikumpulkan data tentang interaksi sosial yang dilakukan oleh warga dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan di Desanya. Hal ini penting karena partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dikelola oleh organisasi non-pemerintah biasanya lebih tinggi bobotnya dibandingkan jika disponsori oleh pemerintah dengan perkataan lain kegiatan yang dibawah oleh organisasi yang tumbuh dari bawah (masyarakat) akan mampu menarik partisipasi aktif masyarakat. Interaksi sosial berdasarkan jawaban responden dalam penelitian ini juga sangat beragam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.19
Intensitas Masyarakat Berinteraksi Sosial Menurut Responden di Desa Maritaing Tahun 2018

No	Intensitas Berinteraksi Sosial	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Aktif	32	26,66
2	Cukup Aktif	34	28,33
3	Kurang Aktif	54	45,00
Jumlah		120	100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa frekuensi responden yang intensitas berinteraksi sosial aktif 32 orang (26,66%), yang cukup aktif 34 orang (28,33%), dan kurang aktif 54 orang (45,00%).

4. Kepemimpinan Tokoh Masyarakat dan Aparat Pemerintah

kepemimpinan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah merupakan faktor yang mempengaruhi keinginan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan secara praktis diasumsikan bahwa pengambilan keputusan yang hanya dilakukan oleh pemimpin akan berbeda konsekuensi logisnya dengan modal pengambilan keputusan yang melibatkan warga masyarakat.

Adapun peran pemimpin berdasarkan tipe kepemimpinannya dalam hal ini tokoh masyarakat dan aparat pemerintah di Desa Maritaing dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 4.20
Tipe Kepemimpinan Yang Disenangi Masyarakat Menurut Responden di Desa Maritaing Tahun 2018

No	Tipe Kepemimpinan	Frekuensi (f)	Presentase (%)
1	Partisipatif	53	44,16
2	Konsultatif	42	35,00
3	Direktif	25	20,83
Jumlah		120	100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian 2018

Dari tabel 5.4 diatas, frekuensi responden dapat dilihat bahwa yang memilih tipe kepemimpinan partisipatif 53 orang (44,16%), dan yang memilih tipe kepemimpinan konsultatif 42 orang (35,00%) serta yang memilih tipe kepemimpinan direktif 25 orang (20,83%). Dari tabel diatas juga menunjukkan bahwa cukup banyak responden yang menginginkan kepemimpinan yang mampu bertindak selaku motivator dalam menggerakkan masyarakat dengan kata lain masyarakat diDesa Maritaing masih memerlukan kepemimpinan yang dapat dicontoh atau bertindak sebagai konsultan mitra ataupun fasilitator dalam peningkatan kualitas permukiman di Desa Maritaing.

I. Analisis Kebijakan Pembangunan di Desa Maritaing

Mengingat besarnya kebutuhan permukiman dan kemampuan sebagian besar masyarakat yang masih rendah maka peningkatan pembangunan dan permukiman rakyat dilakukan secara bertahap dan perlu ditetapkan prioritas-prioritas berdasarkan mendesakya kebutuhan permukiman dari berbagai golongan masyarakat serta memperhatikan manfaat dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pembangunan perumahan senantiasa diharapkan untuk mengaktifkan kecenderungan akan tingginya permintaan akan perumahan dan permukiman akibat tingginya loncatan penduduk.

Dari berbagai macam program kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman seperti P3P (Program Pembangunan Prasarana Permukiman) telah menunjukkan manfaat yang baik mengingat keseriusan dalam penyelenggaraan dan permukiman yang baik.

Dalam melaksanakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman di Desa Maritaing pada prinsipnya lebih ditekankan adalah "IDAMAN". Dengan demikian pembangunan kawasan perumahan dan permukiman di Desa Maritaing tahun 2018 adalah "Mewujudkan Permukiman yang Rapi, Sehat dan Nyaman, serta Terwujudnya Perekonomian Masyarakat yang Mandiri, Bersatu, Kreatif, dan Cerdas".

Pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman di Desa Maritaing antara lain kawasan perumahan dan permukiman dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal dan bermukim, terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Desa Maritaing akan rumah yang layak dalam Desa yang sehat dan asri, mendorong terciptanya kawasan perumahan dan permukiman yang mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat.

J. Analisis Hubungan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan di Sekitar Desa Maritaing.

Dari hasil analisis data secara sistematis, dianalisis seberapa besar hubungan tingkat usia, lamanya tinggal, intensitas berinteraksi sosial, kebutuhan prasarana dan sarana permukiman, tingkat pengetahuan dan kepemimpinan tokoh masyarakat dengan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu maka hubungan keenam aspek itu sekaligus memberikan program peningkatan kualitas Desa permukiman disekitar Desa Maritaing Kabupaten Alor.

1. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Didasarkan pada asumsi bahwa dengan tingkat dari kelompok usia menengah keatas dengan keterkaitan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

Dengan demikian, tinggi rendahnya partisipasi masyarakat juga dapat dipahami dari tingkat usia masyarakat di Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.21
Hubungan Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Tingkat Usia
Di Desa Maritaing Tahun 2018

No	Tingkat Partisipasi masyarakat	Tingkat Usia								Jumlah	
		Lansia		Dewasa		Remaja		Anak-anak			
		55Thn >		18-54 Thn		12-17 Thn		9-11 Thn		F	%
		F	%	F	%	F	%	f	%		
1	Tinggi	1	11,11	48	72,72	5	16,66	2	13,33	56	46,66
2	Sedang	2	22,22	11	16,66	18	60	3	20	34	28,33
3	Rendah	6	66,66	7	10,60	7	23,33	10	66,66	30	25
Jumlah		9	100	66	100	30	100	15	100	120	100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian 2018

Berdasarkan hasil perhitungan Chi-kuadrat diperoleh hasil yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan variabel tingkat usia diperoleh X^2 hitung sebesar 57,84 pada taraf signifikansi 5% dan dapat dibebaskan $(dk)=(4-1) (3-1)=6$ diperoleh X^2 tabel = 12,59 hal ini menunjukkan bahwa X^2 hitung lebih besar ($>$) dari pada X^2 tabel

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat usia dengan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas Desa mempunyai pengaruh yang signifikan.

Selanjutnya dari hasil koefisien kontingensi setelah adanya hasil uji kalkulasi chi-kuadrat didapatkan nilai indeks kuatnya hubungan (IKH) yaitu 0,57. Dari nilai indeks tersebut maka diidentifikasi bahwa tingkat hubungan antara partisipasi masyarakat

dalam peningkatan kualitas Desa permukiman disekitar Desa Maritaing Kabupaten Alor dengan tingkat usia masyarakat adalah memiliki hubungan sedang (lampiran 2).

2. Analisis hubungan Lamanya Tinggal dengan Partisipasi Masyarakat

Lamanya seseorang tinggal dalam Desa tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan Desa tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam Desa tertentu, maka rasa memiliki terhadap Desa cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan Desa tersebut. Lamanya seseorang tinggal dalam Desa berdasarkan jawaban responden dalam penelitian ini juga sangat beragam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.22
Hubungan Tingkat Lamanya Tinggal dengan Partisipasi Masyarakat di Desa Maritaing Tahun 2018

No	Tingkat Partisipasi masyarakat	Lamanya Tinggal								Jumlah	
		Selamanya		10-15 Tahun		5-10 Tahun		Dibawah 5 Tahun			
		f	%	F	%	F	%	f	%	F	%
1	Tinggi	39	73,58	14	53,84	2	11,11	3	13,04	58	46,66
2	Sedang	8	15,09	7	26,92	5	27,77	5	21,73	25	28,33
3	Rendah	6	11,32	5	19,23	11	61,11	15	65,21	37	25
Jumlah		53	100	26	100	18	100	23	100	120	100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian 2018

Tabel memperlihatkan bahwa tingkat lamanya tinggal menurut tanggapan responden yang menjawab untuk tinggal selamanya dengan Persentase sebesar 73,58%, tanggapan responden untuk tinggal 10-15 tahun dengan Persentase sebesar 53,84%, untuk tinggal selama 5-10 tahun mempunyai Persentase sebesar 61,11% dan yang tinggal dibawah 5 tahun memiliki Persentase sebesar 65,21%. Pada jumlah total responden yang paling terbesar ialah tingkat lamanya tinggal selamanya dengan total 73,58%,

Berdasarkan hasil perhitungan Chi-kuadrat diperoleh hasil yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan variabel lamanya tinggal diperoleh X^2 hitung = 41,81 pada taraf kepercayaan 5% dan dapat dibebaskan $(dk) = (4-1) (3-1) = 6$ diperoleh X^2 tabel = 12,59 hal ini menunjukkan bahwa X^2 hitung lebih besar ($>$) dari pada X^2 tabel

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat lamanya tinggal dengan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas Desa mempunyai pengaruh yang signifikan.

Selanjutnya dari hasil koefisien kontingensi setelah adanya hasil uji kalkulasi chi-kuadrat didapatkan nilai indeks kuatnya hubungan (IKH) yaitu 0,50. Dari nilai indeks tersebut maka diidentifikasi bahwa tingkat hubungan antara partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas Desa permukiman disekitar Desa

Maritaing Kabupaten Alor dengan lamanya tinggal adalah memiliki hubungan sedang (lampiran 3).

3. Analisis Hubungan Intensitas Berinteraksi Sosial dengan Partisipasi Masyarakat

Peranan berbagai jenis organisasi sosial dan kemasyarakatan dalam menstimulasi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai asumsi bahwa organisasi yang dibentuk dan mengakar di masyarakat merupakan wadah partisipasi yang efektif oleh karena itu keanggotaan warga masyarakat dalam organisasi yang dibentuk seperti karang taruna LSM dan sebagainya merupakan titik awal partisipasi aktif yang diharapkan oleh pemerintah.

Tabel dibawah ini memuat hasil pengelolaan data mengenai intensitas berinteraksi sosial melalui keterlibatan masyarakat dalam mendukung program peningkatan kualitas Pedesaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.23
Hubungan Tingkat Interaksi Sosial dengan Partisipasi Masyarakat di
Desa Maritaing Tahun 2018

No	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Interaksi Sosial						Jumlah	
		Aktif		Kurang Aktif		Tidak aktif			
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Tinggi	16	50,00	4	11,76	12	22,22	32	26,66
2	Sedang	9	28,12	11	32,35	18	33,33	38	31,66
3	Rendah	7	21,87	19	55,88	24	44,44	50	41,66
Jumlah		32	100	34	100	54	100	120	100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian 2018

Pada perhitungan Chi-kuadrat, diperoleh X^2 hitung adalah 14,70 pada taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) = $(3-1)(3-1)=4$ diperoleh X^2 tabel = 9,49 dengan demikian X^2 hitung lebih besar (>) dari pada X^2 tabel.

Hal ini berarti bahwa intensitas masyarakat berinteraksi sosial melalui keikutsertaannya dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam mendukung program peningkatan kualitas Desa.

Angka koefisien kontigensi yang diperoleh setelah adanya hasil uji kalkulasi chi-kuadrat didapatkan nilai indeks kuatnya hubungan (IKH) adalah 0,33. Dari nilai indeks tersebut maka

diidentifikasi intensitas interaksi sosial dengan partisipasi masyarakat adalah lemah (lampiran 4).

Berdasarkan pada hasil analisa tersebut dapat dinyatakan bahwa diperlukan adanya sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat yang masih kurang aktif dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, adapun organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang perlu ditingkatkan kegiatannya yaitu karang taruna dan perkumpulan keagamaan karena dari organisasi-organisasi inilah masyarakat termotivasi untuk berperan aktif dalam kegiatan peningkatan kualitas Desa.

4. Analisis Hubungan Kepemimpinan Dengan Partisipasi Masyarakat.

Keterlibatan pemimpin formal dan non-formal, yakni aparat pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengelolaan permukiman merupakan bukti nyata adanya kebersamaan semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya ini memang diperlukan mengingat ada sebagian masyarakat yang merasa lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan diDesanya karena ada tokoh yang diteladani. Dengan demikian, keterlibatan pemimpin banyak peranannya dalam menstimulasi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program pengelolaan permukiman.

Hasil pengolahan data tentang urgensi pemimpin dengan tipe kepemimpinannya dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan untuk meningkatkan kualitas Desa di Desa Maritaing dapat dilihat pada tabel 5.8 berikut :

Tabel 4.24
Tipe Kepemimpinan dengan Partisipasi Masyarakat di Desa Maritaing Tahun 2018

No	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Tipe Kepemimpinan						Jumlah	
		Partisipatif		Konsultatif		Direktif			
		F	%	f	%	F	%	f	%
1	Tinggi	24	45,28	10	23,80	4	16,00	38	31,66
2	Sedang	17	32,07	21	50,00	10	40,00	48	40,00
3	Rendah	12	22,64	11	26,19	11	44,00	34	28,33
Jumlah		53	100	42	100	25	100	120	100

Sumber : Hasil Analisis Penelitian 2018

Pada perhitungan Chi-kuadrat, diperoleh X^2 hitung adalah 10,98 pada taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) = $(3-1)(3-1)=4$ diperoleh X^2 tabel = 9,49 dengan demikian X^2 hitung lebih besar (>) dari pada X^2 tabel.

Hal ini berarti bahwa peranan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas Desa.

Selanjutnya dari hasil koefisien kontingensi setelah adanya hasil uji kalkulasi *chi-kuadrat* didapatkan nilai indeks kuatnya hubungan (IKH) yaitu 0,28. Dari nilai indeks tersebut maka

diidentifikasi bahwa tingkat hubungan antara tipe kepemimpinan dengan tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan lemah (lampiran 6).

5. Prioritas Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan dari beberapa analisis yang telah dilakukan diatas, maka dapat diformulasikan prioritas kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas Desa disekitar Desa Maritaing Kabupaten Alor.

Analisis terhadap variabel-variabel yang dianggap berpengaruh dalam proses tersebut antara lain X1 Tingkat Usia, X2 Lamanya Tinggal, X3 Intensitas Berinteraksi Sosial, X4 Kebutuhan Sarana dan Prasarana, X5 Tingkat Pengetahuan, X6 Kepemimpinan Tokoh Masyarakat dan Aparat Pemerintah.

Tabel 4.25
Prioritas Pelaksanaan Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat di
Desa Maritaing Tahun 2018

No	C-Q	C	Solusi
	5%	5%	
X1	Berpengaruh	Hubungan sedang	Prioritas Pertama
X2	Berpengaruh	Hubungan sedang	Prioritas Kedua
X3	Berpengaruh	Hubungan lemah	Prioritas Ketiga
X4	Berpengaruh	Hubungan lemah	Prioritas Keempat
X5	Berpengaruh	Hubungan lemah	Prioritas Kelima
X6	Berpengaruh	Hubungan lemah	Prioritas Keenam

Sumber : Hasil Analisis Penelitian 2018

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi prioritas utama yang perlu dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pedesaan adalah meningkatkan intensitas berinteraksi sosial, kebutuhan sarana dan prasarana, tingkat kepemimpinan, dan tingkat pengetahuan sebagai solusi dalam upaya memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.

K. Beberapa Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Desa Permukiman disekitar Desa Maritaing Kabupaten Alor.

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan langkah mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses,

keterampilan analisis dan perencanaan pembangunan, yang dimulai dari daerah tempat mereka berkarya.

Berdasarkan hasil pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Maka berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas Desa disekitar Desa Maritaing Kabupaten Alor, sebagai berikut :

1. Ketegasan dan konsisten hukum

Hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat adalah keberadaan aturan hukum yang menjadi landasan bagi keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi. Hampir disemua daerah tidak ditemukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, padahal perda merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Selama ini ruang bagi publik untuk berpartisipasi dilakukan oleh masyarakat secara spontan melalui beberapa sarana. Diantara sarana utama yang digunakan sebagai media partisipasi adalah public hearing di DPRD, pengaduan di Kabupatenk – Kabupatenk saran, dan melalui lembaga-lembaga resmi lainnya.

2. Pemberdayaan masyarakat

Memberdayakan dan melakukan pendidikan terhadap masyarakat yakni dengan mendesain proses sehingga masyarakat

mengetahui bahwa partisipasi mereka dapat memberikan dampak, melibatkan keterwakilan yang luas dari masyarakat, serta dapat menghasilkan keluaran yang dapat dilihat. Pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam proses pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan program-program pemberdayaan yang telah dan sementara dilaksanakan oleh pemerintah merupakan program-program berkelanjutan serta meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama program dan yang paling penting adalah program-program tersebut lebih berusaha untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BOSOWA



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada empat faktor yang mempunyai pengaruh terhadap persepsi masyarakat dalam pembangunan desa yakni, tingkat usia, lamanya tinggal, intensitas berinteraksi, dan tipe kepemimpinan. Dari uraian hasil analisis Chi-kuadrat dapat diketahui bahwa faktor yang paling tinggi nilai hubungannya adalah faktor tingkat usia hal ini dikarenakan kelompok usia menengah keatas dengan keterkaitan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
2. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan desa di Desa Maritaing yaitu :
 - a. Dibutuhkan ketegasan dan konsistensi hukum dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat karena keberadaan aturan hukum yang menjadi landasan bagi keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi.
 - b. Memberdayakan dan melakukan pendidikan terhadap masyarakat yakni dengan mendesain proses sehingga masyarakat mengetahui

bahwa partisipasi mereka dapat memberikan dampak, melibatkan keterwakilan yang luas dari masyarakat, serta dapat menghasilkan keluaran yang dapat dilihat.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan desa di Desa maritaing sangat dibutuhkan dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, peaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
2. Pemerintah sebagai pemimpin masyarakat dan penentu kebijakan harus lebih aktif mengadakan penyuluhan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan desa karena semua itu untuk kepentingan masyarakat banyak.
3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws., et al., ed. 1999. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Sekretariat Bina Desa, Jakarta.
- Abi Praja Soedjono, *Perencanaan Pembangunan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga Press, 2002), Hlm.37
- Aprillia Theresia, Krishna dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung :Alfabeta. Hal 197, 200, 202, 205-206.
- Hartono. 2012. *Statistik untuk penelitian*. Pustaka pelajar: Yogyakarta
- Holil Soelaiman. 1980. *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- Hetifah, Sj Sumarto, 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Husaini, Purnomo. 2008. *Pengantar Statistika*. Bumi. Aksara: Jakarta
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Siagian, S. T. 1998. *Partisipasi Masyarakat Dalam Memberi Sumbangsi Bagi Pembangunan*. Andi Press. Jakarta.
- Suciati. 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pati*. Tesis (Tidak diterbitkan). Semarang : Universitas Diponegoro
- Sudirman. 2006. *Melegalkan Partisipasi Masyarakat Berpendapatan Rendah Dalam Kebijakan*. Governance Brief, Jakarta.
- Sugiono. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yudhistira: Surabaya.
- Sumodingrat. 1988. *Partisipasi Masyarakat Sebagai Elemen Dalam Pembangunan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Sutami. 2009. *Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat*

Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Marunda Jakarta Utara. Tesis
(Tidak diterbitkan). Semarang : Universitas Diponegoro.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang

<http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>

